



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123 /PMK.02/2021

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

- (1) SBK meliputi:
 - a. SBK Umum yaitu SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga; dan
 - b. SBK Khusus yaitu SBK yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.
- (2) SBK Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. SBK Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. SBK Laporan Kinerja;
 - c. SBK Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. SBK Audit Kinerja;
 - e. SBK Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3);
 - f. SBK Penyusunan Peraturan Menteri;
 - g. SBK Sosialisasi;
 - h. SBK Pemantauan dan Evaluasi;
 - i. SBK Kehumasan dan Informasi; dan
 - j. SBK Penelitian.

Pasal 3

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga untuk Tahun Anggaran 2022;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;

- c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2023; dan/atau
- d. referensi penyusunan SBK untuk keluaran (*output*) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf j, dan SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dan huruf i berfungsi sebagai estimasi.
- (3) SBK Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berfungsi sebagai estimasi, besarnya dapat dilampaui setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dan dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - c. prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk SBK Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau *reviewer*.

- (2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer*, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.
- (4) Pembayaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SBK Penelitian mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

- (1) SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan SBK dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2022 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.
- (2) Pengawasan atas penggunaan SBK dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian

Negara/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

15

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1042

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213.199703 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 /PMK.02/2021
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022

SBK UMUM

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Standar Biaya Keluaran Perencanaan dan Penganggaran			
	a. SBK Layanan Penyusunan RKA untuk Satker Eselon I/Setingkat			
	1) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	51.700.000	
	2) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	410.200.000	
	3) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	758.300.000	
	4) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	1.493.100.000	
	5) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal di atas 34 satker	1 Dokumen	1.725.100.000	
	b. SBK Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L)			
	1) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	212.000.000	
	2) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	360.100.000	
	3) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	545.100.000	
	4) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga dengan unit vertikal di atas 10 unit	1 Dokumen	619.100.000	
2	Standar Biaya Keluaran Laporan Kinerja (LAKIN)			
	a. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat			
	1) Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	17.300.000	
	2) Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	135.900.000	
	3) Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	252.800.000	
	4) Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	497.800.000	
	5) Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal di atas 34 satker	1 Dokumen	575.100.000	
	b. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L)			
	1) Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	70.600.000	
	2) Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	120.000.000	
	3) Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	181.700.000	
	4) Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal di atas 10 unit	1 Dokumen	206.300.000	
3	Standar Biaya Keluaran Pendidikan dan Pelatihan			
	a. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan			
	1) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama	1 Orang	30.261.000	
	2) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	1 Orang	22.125.000	
	3) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	1 Orang	20.230.000	
	b. Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan			
	1) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	1 Orang	9.296.000	
	2) Layanan Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	1 Orang	2.242.000	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
4	Standar Biaya Keluaran Audit Kinerja			
	a. Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama			
	1) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Aceh	1 LHA	27.300.000	
	2) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Utara	1 LHA	25.800.000	
	3) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Riau	1 LHA	25.500.000	
	4) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kepulauan Riau	1 LHA	24.900.000	
	5) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jambi	1 LHA	21.200.000	
	6) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Barat	1 LHA	24.200.000	
	7) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Selatan	1 LHA	23.700.000	
	8) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Lampung	1 LHA	17.700.000	
	9) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bengkulu	1 LHA	22.000.000	
	10) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bangka Belitung	1 LHA	21.300.000	
	11) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Banten	1 LHA	15.300.000	
	12) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Barat	1 LHA	14.400.000	
	13) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta	1 LHA	2.700.000	
	14) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Tengah	1 LHA	19.600.000	
	15) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.I. Yogyakarta	1 LHA	24.000.000	
	16) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Timur	1 LHA	23.900.000	
	17) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bali	1 LHA	28.500.000	
	18) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHA	25.400.000	
	19) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHA	20.800.000	
	20) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Barat	1 LHA	22.400.000	
	21) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHA	23.700.000	
	22) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHA	23.100.000	
	23) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Timur	1 LHA	30.300.000	
	24) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Utara	1 LHA	28.200.000	
	25) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Utara	1 LHA	31.400.000	
	26) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Gorontalo	1 LHA	31.000.000	
	27) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Barat	1 LHA	31.500.000	
	28) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHA	27.300.000	
	29) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHA	33.100.000	
	30) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHA	29.000.000	
	31) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Maluku	1 LHA	37.100.000	
	32) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Maluku Utara	1 LHA	34.600.000	
	33) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua	1 LHA	45.400.000	
	34) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Barat	1 LHA	48.500.000	
	b. Layanan Audit Kinerja Dalam Kota			
	1) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Aceh	1 LHA	58.300.000	
	2) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera Utara	1 LHA	56.800.000	
	3) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Riau	1 LHA	56.500.000	
	4) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kepulauan Riau	1 LHA	55.800.000	
	5) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jambi	1 LHA	52.200.000	
	6) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera Barat	1 LHA	55.200.000	
	7) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera Selatan	1 LHA	54.700.000	
	8) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Lampung	1 LHA	48.700.000	
	9) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bengkulu	1 LHA	53.000.000	
	10) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bangka Belitung	1 LHA	52.200.000	
	11) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Banten	1 LHA	46.200.000	
	12) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jawa Barat	1 LHA	45.300.000	
	13) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi D.K.I. Jakarta	1 LHA	36.200.000	
	14) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jawa Tengah	1 LHA	50.600.000	
	15) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta	1 LHA	54.900.000	
	16) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jawa Timur	1 LHA	54.900.000	

(dalam rupiah)				
No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	17) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bali	1 LHA	59.500.000	
	18) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHA	56.300.000	
	19) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHA	60.800.000	
	20) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Barat	1 LHA	53.300.000	
	21) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHA	54.600.000	
	22) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHA	54.100.000	
	23) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Timur	1 LHA	61.300.000	
	24) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Utara	1 LHA	59.200.000	
	25) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Utara	1 LHA	62.400.000	
	26) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Gorontalo	1 LHA	62.000.000	
	27) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Barat	1 LHA	62.500.000	
	28) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHA	58.300.000	
	29) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHA	64.100.000	
	30) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHA	60.000.000	
	31) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Maluku	1 LHA	68.000.000	
	32) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Maluku Utara	1 LHA	65.500.000	
	33) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua	1 LHA	76.400.000	
	34) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua Barat	1 LHA	79.500.000	
	c. Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi			
	1) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Aceh	1 LHA	125.800.000	
	2) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Utara	1 LHA	121.000.000	
	3) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Riau	1 LHA	142.700.000	
	4) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kepulauan Riau	1 LHA	137.200.000	
	5) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jambi	1 LHA	109.400.000	
	6) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Barat	1 LHA	126.300.000	
	7) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Selatan	1 LHA	139.900.000	
	8) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Lampung	1 LHA	93.600.000	
	9) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bengkulu	1 LHA	115.700.000	
	10) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bangka Belitung	1 LHA	119.500.000	
	11) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Banten	1 LHA	109.800.000	
	12) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Barat	1 LHA	101.300.000	
	13) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Tengah	1 LHA	103.200.000	
	14) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi D.I. Yogyakarta	1 LHA	141.900.000	
	15) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Timur	1 LHA	128.700.000	
	16) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bali	1 LHA	161.600.000	
	17) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHA	128.200.000	
	18) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHA	135.900.000	
	19) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Barat	1 LHA	114.100.000	
	20) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHA	124.100.000	
	21) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHA	116.000.000	
	22) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Timur	1 LHA	154.900.000	
	23) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Utara	1 LHA	149.900.000	
	24) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Utara	1 LHA	152.100.000	
	25) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Gorontalo	1 LHA	149.400.000	
	26) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Barat	1 LHA	149.400.000	
	27) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHA	138.300.000	
	28) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHA	167.400.000	
	29) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHA	147.000.000	
	30) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Maluku	1 LHA	157.900.000	
	31) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Maluku Utara	1 LHA	142.700.000	
	32) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua	1 LHA	203.000.000	
	33) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua Barat	1 LHA	187.200.000	
5	Standar Biaya Keluaran Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)			
	a. Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi- <i>Reprint</i>			
	1) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi- <i>Reprint</i> dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	99.060.000	
	2) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi- <i>Reprint</i> dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	99.060.000	

(dalam rupiah)				
No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	3) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi- <i>Reprint</i> dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	99.060.000	
	4) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi- <i>Reprint</i> dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	99.060.000	
	5) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi- <i>Reprint</i> dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	99.060.000	
	6) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi- <i>Reprint</i> dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	104.135.000	
	7) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi- <i>Reprint</i> dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	104.135.000	
	8) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi- <i>Reprint</i> dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	104.135.000	
	9) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi- <i>Reprint</i> dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	104.135.000	
	10) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi- <i>Reprint</i> dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	104.135.000	
	b. Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan			
	1) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	265.340.000	
	2) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	360.840.000	
	3) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	528.880.000	
	4) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	626.780.000	
	5) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	735.550.000	
	6) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	850.670.000	
	7) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.012.590.000	
	8) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.112.790.000	
	9) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.285.430.000	
	10) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.385.630.000	
	c. Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri			
	1) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	388.825.000	
	2) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	488.295.000	
	3) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	649.235.000	
	4) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	753.435.000	
	5) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	841.935.000	
	6) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	958.625.000	
	7) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.100.275.000	
	8) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.194.260.000	
	9) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.344.230.000	
	10) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.432.730.000	
	d. Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan			
	1) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	390.340.000	
	2) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	485.840.000	
	3) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	653.880.000	
	4) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	751.780.000	
	5) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	860.550.000	
	6) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	975.670.000	
	7) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.137.590.000	
	8) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.237.790.000	
	9) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.410.430.000	
	10) Dokumen RSN13 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.510.630.000	
6	Standar Biaya Keluaran Penyusunan Peraturan Menteri			
	a. Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Internal	1 Peraturan	100.000.000	
	b. Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Eksternal	1 Peraturan	200.000.000	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
7	Standar Biaya Keluaran Sosialisasi			
	a. Layanan Sosialisasi Berskala Kecil	1 Laporan	67.500.000	
	b. Layanan Sosialisasi Berskala Sedang	1 Laporan	135.000.000	
	c. Layanan Sosialisasi Berskala Besar	1 Laporan	305.000.000	
8	Standar Biaya Keluaran Pemantauan dan Evaluasi			
	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	240.000.000	
9	Standar Biaya Keluaran Kehumasan dan Informasi			
	Layanan Kehumasan dan Informasi	1 Layanan	458.000.000	
10	Standar Biaya Keluaran Penelitian			
	a. Laporan Riset Pembinaan/Kapasitas	1 Laporan	20.000.000	
	b. Laporan Riset Dasar			
	1) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	151.320.000	
	2) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Laporan	135.670.000	
	3) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	307.000.000	
	4) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	168.400.000	
	5) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	90.000.000	
	6) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)	1 Laporan	235.000.000	
	7) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	179.960.000	
	8) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.050.000	
	9) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	123.800.000	
	10) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	120.000.000	
	11) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	230.000.000	
	12) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	290.000.000	
	13) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	480.000.000	
	14) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	665.000.000	
	15) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	640.000.000	
	16) Laporan Riset Dasar Teoritis	1 Laporan	40.546.200	
	c. Laporan Riset Terapan			
	1) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	216.000.000	
	2) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus EBT	1 Laporan	221.900.000	
	3) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	448.800.000	
	4) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	143.200.000	
	5) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus TIK	1 Laporan	208.400.000	
	6) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	400.200.000	
	7) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	370.800.000	
	8) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	200.000.000	
	9) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	327.500.000	
	10) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	150.000.000	
	11) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	165.000.000	
	12) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	290.000.000	
	13) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	480.000.000	
	14) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	665.000.000	
	15) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	640.000.000	
	d. Laporan Riset Pengembangan			
	1) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	568.100.000	
	2) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus EBT	1 Laporan	1.124.800.000	
	3) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	1.048.100.000	
	4) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	349.600.000	
	5) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK	1 Laporan	402.500.000	
	6) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	559.600.000	
	7) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	724.038.000	
	8) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	301.500.000	
	9) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	1.083.700.000	
	10) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	1 Laporan	515.000.000	
	e. Laporan Kajian Aktual Strategis	1 Naskah Kebijakan	25.000.000	

PENJELASAN

SBK UMUM

1. Standar Biaya Keluaran Perencanaan dan Penganggaran

SBK Perencanaan dan Penganggaran merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut bagian anggaran K/L. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Penyusunan RKA untuk satker eselon I/setingkat

SBK Layanan Penyusunan RKA untuk satker eselon I/setingkat merupakan SBK Layanan Penyusunan RKA yang digunakan oleh satker unit organisasi lini K/L yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat. Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut untuk penyusunan RKA-K/L.

b. SBK Layanan Penyusunan RKA untuk K/L

SBK Layanan Penyusunan RKA untuk K/L merupakan SBK Layanan Penyusunan RKA yang digunakan untuk melakukan koordinasi seluruh eselon I/setingkat untuk penyusunan RKA-K/L.

2. Standar Biaya Keluaran Laporan Kinerja (LAKIN)

SBK Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk satker eselon I/setingkat

SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk satker eselon I/setingkat merupakan SBK Layanan Penyusunan LAKIN yang digunakan oleh satker unit organisasi lini K/L setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.

Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi

satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut.

b. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L

SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L merupakan SBK Layanan Penyusunan LAKIN yang digunakan dalam rangka penyusunan LAKIN bagi K/L.

3. Standar Biaya Keluaran Pendidikan dan Pelatihan

SBK Pendidikan dan Pelatihan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa peserta yang telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama, Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*;
- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

b. SBK Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*.
- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

4. Standar Biaya Keluaran Audit Kinerja

SBK Audit Kinerja merupakan besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawas Inter Pemerintah (APIP) untuk menghasilkan keluaran (*output*) audit kinerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara lain:

- a. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau
- c. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerja yang dalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama
SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama merupakan SBK Layanan Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi satker APIP.
- b. SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Kota
SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Kota merupakan SBK Layanan Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berada di dalam kota yang sama dengan lokasi satker APIP.
- c. SBK Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi
SBK Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi merupakan SBK Layanan Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berbeda provinsi dengan lokasi satker APIP.

5. Standar Biaya Keluaran Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)

SBK Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3) merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa dokumen RSNI yang dihasilkan pada tahap pembahasan konsep sampai dengan tahap konsensus dari Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tingkat K/L.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-*reprint* yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar

atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.

- b. RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- c. RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri yaitu metode perumusan RSNI3 dengan cara penyusunan sendiri berdasarkan data/hasil penelitian dan menggunakan referensi dokumen acuan yang tertelusur.
- d. RSNI3 yang disusun dengan adopsi modifikasi metode terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara modifikasi dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.

Dalam penyusunan RSNI3, besaran biaya ditentukan oleh keluaran (*output*) akhir berupa jumlah halaman dokumen RSNI3 dan metode perumusan RSNI3 yang dipilih.

6. Standar Biaya Keluaran Penyusunan Peraturan Menteri

SBK Penyusunan Peraturan Menteri merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa peraturan menteri/pimpinan lembaga yang dihasilkan dari tahap penyusunan konsep, pembahasan, penetapan, sampai dengan tahap pengundangan peraturan menteri/pimpinan lembaga.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Internal
SBK Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Internal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat hanya ke dalam kementerian/lembaga berkenaan.
- b. SBK Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Eksternal
SBK Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Eksternal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan

peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat ke luar kementerian/lembaga berkenaan.

7. Standar Biaya Keluaran Sosialisasi

SBK Sosialisasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan/menyebarkan informasi kepada pihak terkait yang meliputi tahap perencanaan kebutuhan, pelaksanaan, sampai dengan tahap penyusunan laporan sosialisasi dan/atau diseminasi.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Kecil

SBK Layanan Sosialisasi Berskala Kecil merupakan SBK yang digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi yang dihadiri oleh pejabat eselon I/setara ke atas dengan jumlah peserta minimal 150 orang.

b. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Sedang

SBK Layanan Sosialisasi Berskala Sedang merupakan SBK yang digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi yang dihadiri oleh pejabat eselon I/setara ke atas dengan jumlah peserta minimal 400 orang.

c. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Besar

SBK Layanan Sosialisasi Berskala Besar merupakan SBK yang digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi yang dihadiri oleh Menteri/setara ke atas dengan jumlah peserta minimal 500 orang.

8. Standar Biaya Keluaran Pemantauan dan Evaluasi

SBK Pemantauan dan Evaluasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan atas kebijakan strategis, meliputi penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi, pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, penyusunan laporan dan rekomendasi melalui kegiatan visitasi lapangan.

9. Standar Biaya Keluaran Kehumasan dan Informasi

SBK Kehumasan dan Informasi merupakan besaran biaya yang

digunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi kebijakan kementerian/lembaga yang dilakukan dalam rangka kegiatan komunikasi publik/siaran pers.

10. Standar Biaya Keluaran Penelitian

- a. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Pembinaan/Kapasitas SBK Laporan Riset Pembinaan/Kapasitas merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final. Dalam hal keluaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut, besaran biaya keluarannya diatur sebagai berikut:

- 1) Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 2) Publikasi/artikel nasional terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 3) Publikasi/artikel regional/internasional tidak terindeks untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- b. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Dasar

SBK Laporan Riset Dasar merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

Penggunaan SBK Laporan Riset Dasar mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian
SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen memperoleh manfaat

dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan (konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan).

2) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus EBT merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang EBT mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan.

3) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

4) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

5) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus TIK merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.

- 6) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.

- 7) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Material Maju merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.

- 8) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Kemaritiman merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

- 9) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Kebencanaan merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi atau menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- 10) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.

- 11) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di luar negeri.

- 12) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, *focus group discussion* (FGD), kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 (lima) lokasi di dalam negeri.

- 13) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni

Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- 14) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)
SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.
- 15) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri
SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri.
- 16) SBK Laporan Riset Dasar Teoritis
SBK Laporan Riset Dasar Teoritis merupakan kelompok yang melingkup riset-riset dibidang keilmuan dasar yang tidak ada dalam kelompok bidang fokus 10 (sepuluh) lainnya, diantaranya matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, statistika dan lainnya. Riset ini ditujukan untuk mencari ilmu pengetahuan baru, pencarian yang bersistem untuk menemukan hal yang

belum diketahui, yang belum dapat ditentukan implementasinya. Penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini merupakan dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian teoritis dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung bidang fokus lainnya. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.

c. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Terapan

SBK Laporan Riset Terapan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Laporan Riset Terapan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-

ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

2) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus EBT merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

3) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

4) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

5) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus TIK merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi,

pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.

- 6) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.

- 7) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif pendukung industri.

- 8) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

- 9) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- 10) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di dalam negeri.

- 11) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di luar negeri.

- 12) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian

bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 (lima) lokasi di dalam negeri.

- 13) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- 14) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- 15) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset

yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.

d. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Pengembangan

SBK Laporan Riset Pengembangan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Laporan Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut:

1) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

- 2) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus EBT merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi, dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.
- 3) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
- 4) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- 5) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan

pemindahan informasi antarmedia.

- 6) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.

- 7) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.

- 8) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, dan jasa-jasa kelautan.

- 9) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, nonalam, dan/atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- 10) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan

SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan merupakan SBK

Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

e. Standar Biaya Keluaran Laporan Aktual Strategis

SBK Laporan Kajian Aktual Strategis merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Catatan Umum:

1. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar, SBK Laporan Riset Terapan, dan SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, TIK, Hankam, Material Maju, Kemaritiman, dan Kebencanaan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
 - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
 - l. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
2. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar, SBK Laporan Riset Terapan, dan SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial, Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;

- c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. buku nasional;
 - f. buku internasional;
 - g. naskah kebijakan;
 - h. artikel populer di media cetak;
 - i. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
 - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
 - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks; dan/atau
 - l. karya seni (tari, patung, lukisan, puisi, musik).
3. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
 - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
 - l. jenis hasil penangkaran;
 - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan;
 - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru;
 - o. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
 - p. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
 - q. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
4. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;

- c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
 - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
 - l. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
5. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
 - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
 - l. jenis hasil penangkaran;
 - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan;
 - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru; dan/atau
 - o. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional.
6. Terhadap SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;

- g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
 - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
 - r. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
 - s. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
 - t. paten sederhana terdaftar;
 - u. merek dagang terdaftar;
 - v. desain industri terdaftar;
 - w. rahasia dagang terdaftar;
 - x. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - y. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
 - z. indikasi geografis terdaftar.
7. Terhadap SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);

- k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
 - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
 - r. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
 - s. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks;
 - t. paten sederhana terdaftar;
 - u. merek dagang terdaftar;
 - v. desain industri terdaftar;
 - w. rahasia dagang terdaftar;
 - x. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - y. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
 - z. indikasi geografis terdaftar.
8. Terhadap SBK Laporan Riset Terapan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;

- o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis flora hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - q. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - r. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
 - s. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
 - t. produk *biosimilar* atau *kit diagnostic*;
 - u. prototipe benih/*seed* telah terkarakterisasi sesuai regulasi;
 - v. prototipe laik *preklinis*;
 - w. herbal terstandar;
 - x. paten sederhana terdaftar;
 - y. merek dagang terdaftar;
 - z. desain industri terdaftar;
 - aa. rahasia dagang terdaftar;
 - bb. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - cc. perlindungan varietas tanaman terdaftar;
 - dd. indikasi geografis terdaftar; dan/atau
 - ee. fitofarmaka.
9. Terhadap SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. taman tematik, kebun, koleksi;
 - k. paten sederhana terdaftar;
 - l. merek dagang terdaftar;
 - m. desain industri terdaftar;

- n. rahasia dagang terdaftar;
 - o. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - p. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
 - q. indikasi geografis terdaftar.
10. Terhadap SBK Laporan Pengembangan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
 - d. publikasi/artikel jurnal Internasional bereputasi;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik Industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten terdaftar;
 - h. paten *granted*;
 - i. paten terpakai di industri;
 - j. taman tematik, kebun, koleksi;
 - k. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 1*;
 - l. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 2*;
 - m. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 3*;
 - n. paten sederhana terdaftar;
 - o. merek dagang terdaftar;
 - p. desain industri terdaftar;
 - q. rahasia dagang terdaftar;
 - r. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
 - s. perlindungan varietas tanaman terdaftar;
 - t. indikasi geografis terdaftar; dan/atau
 - u. fitofarmaka.
11. Besaran tambahan biaya SBK Laporan Riset Dasar, SBK Laporan Riset Terapan, dan SBK Laporan Riset Pengembangan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000

No	Uraian	Besaran
3	Publikasi/artikel jurnal internasional	15.000.000
4	Publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi	50.000.000
5	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional	2.000.000
6	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional	5.000.000
7	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks	10.000.000
8	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
9	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
10	Paten terdaftar	75.000.000
11	Paten <i>granted</i>	80.000.000
12	Paten terpakai di industri	90.000.000
13	Paten Sederhana terdaftar	25.000.000
14	Merek Dagang terdaftar	75.000.000
15	Desain Industri terdaftar	75.000.000
16	Rahasia Dagang terdaftar	75.000.000
17	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar	75.000.000
18	Perlindungan Varietas Tanaman terdaftar	75.000.000
19	Indikasi geografis terdaftar	75.000.000
20	Buku nasional	30.000.000
21	Buku internasional	65.000.000
22	Karya Seni (Tari, Patung, Lukisan, Puisi, Musik)	50.000.000
23	Naskah kebijakan	25.000.000
24	Artikel populer di media cetak	2.000.000
25	Material untuk produk biologi	50.000.000
26	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
27	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000

No	Uraian	Besaran
28	Galur perbaikan untuk <i>seed</i> /sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
29	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
30	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
31	Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat	150.000.000
32	Temuan senyawa/ <i>sequence</i> DNA penambahan	100.000.000
33	Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat	150.000.000
34	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
35	Galur perbaikan	150.000.000
36	PVT/Varietas terdaftar	1.000.000.000
37	PVT/Varietas terdaftar ornamental	100.000.000
38	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i>	200.000.000
39	Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	600.000.000
40	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i>	100.000.000
41	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	500.000.000
42	Jenis isolasi/ekstraksi <i>bioresources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000
43	Jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
44	Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>blood</i> produk, atau <i>kit diagnostic</i>	1.000.000.000
45	Prototipe benih/ <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi	500.000.000
46	Prototipe laik <i>preklinis</i>	1.000.000.000
47	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i> ;	1.000.000.000

No	Uraian	Besaran
48	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i> ;	6.000.000.000
49	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i> .	10.000.000.000
50	Herbal terstandar	200.000.000
51	Fitofarmaka	200.000.000
52	Taman tematik, kebun, koleksi	300.000.000

12. Kementerian negara/lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK untuk kegiatan penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan besaran tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 11 didasarkan atas:

- a. Ketersediaan alokasi anggaran;
- b. Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 100% (seratus persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - 2) *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - 3) *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP.19730213-199703 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 /PMK.02/2021
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022

SBK KHUSUS

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)		(dalam rupiah)		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
004.01	Badan Pemeriksa Keuangan			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Pemeriksaan Keuangan Negara			
1	LHP LKPP	1 LHP	10.653.137.000	
	Pemeriksaan Keuangan Negara			
2	Laporan Hasil Penilaian Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 Laporan	1.112.385.000	
3	Laporan Hasil Reviu Kelembagaan	6 Laporan	2.622.895.000	
4	Laporan Reviu atas Konsep LK BPK	4 Laporan	2.738.088.000	
5	Laporan Reviu atas Konsep RKA BPK	1 Laporan	245.510.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Pemeriksaan Keuangan Negara			
6	LHP AKN I	1 LHP	1.223.587.000	
7	LHP AKN II	1 LHP	1.320.255.000	
8	LHP AKN III	1 LHP	717.701.000	
9	LHP AKN IV	1 LHP	1.685.695.000	
10	LHP AKN V	1 LHP	1.131.346.000	
11	LHP AKN VI	1 LHP	1.581.786.000	
12	LHP AKN VII	1 LHP	1.220.255.000	
13	LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1 LHP	267.232.000	
14	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1 LHP	226.366.000	
15	LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau	1 LHP	309.456.000	
16	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	1 LHP	282.346.000	
17	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi	1 LHP	269.152.000	
18	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	1 LHP	246.161.000	
19	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	1 LHP	313.332.000	
20	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1 LHP	263.688.000	
21	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	1 LHP	259.530.000	
22	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 LHP	298.167.000	
23	LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten	1 LHP	289.012.000	
24	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1 LHP	276.377.000	
25	LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1 LHP	876.913.000	
26	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1 LHP	256.137.000	
27	LHP BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta	1 LHP	308.547.000	
28	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1 LHP	290.109.000	
29	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali	1 LHP	331.430.000	
30	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHP	273.912.000	
31	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHP	270.496.000	
32	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	1 LHP	256.883.000	
33	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHP	287.996.000	
34	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHP	282.920.000	
35	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	1 LHP	322.394.000	
36	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	1 LHP	284.795.000	
37	LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1 LHP	310.091.000	
38	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	1 LHP	256.781.000	
39	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHP	295.399.000	
40	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHP	318.621.000	
41	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHP	291.290.000	
42	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 LHP	296.066.000	
43	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1 LHP	290.955.000	
44	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua	1 LHP	388.563.000	
45	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	1 LHP	303.708.000	
46	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1 LHP	320.067.000	
47	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN I	1 Laporan	155.350.000	
48	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN II	1 Laporan	155.350.000	
49	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN III	1 Laporan	155.350.000	
50	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN IV	1 Laporan	155.350.000	
51	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN V	1 Laporan	155.350.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukar	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
52	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN VI	1 Laporan	155.350.000	
53	Laporan Hasil Evaluasi KAP AKN VII	1 Laporan	155.350.000	
54	LHP Interim/Pendahuluan AKN I	1 Laporan	431.578.000	
55	LHP Interim/Pendahuluan AKN II	1 Laporan	530.807.000	
56	LHP Interim/Pendahuluan AKN III	1 Laporan	228.634.000	
57	LHP Interim/Pendahuluan AKN IV	1 Laporan	684.008.000	
58	LHP Interim/Pendahuluan AKN V	1 Laporan	431.578.000	
59	LHP Interim/Pendahuluan AKN VI	1 Laporan	684.013.000	
60	LHP Interim/Pendahuluan AKN VII	1 Laporan	431.578.000	
61	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1 Laporan	194.996.000	
62	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	159.187.000	
63	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Riau	1 Laporan	236.031.000	
64	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	214.428.000	
65	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	1 Laporan	196.984.000	
66	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	178.498.000	
67	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	237.411.000	
68	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1 Laporan	193.517.000	
69	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	1 Laporan	171.245.000	
70	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	213.755.000	
71	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Banten	1 Laporan	215.773.000	
72	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	203.106.000	
73	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	407.255.000	
74	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	189.058.000	
75	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1 Laporan	235.678.000	
76	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	206.443.000	
77	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bali	1 Laporan	246.220.000	
78	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	179.827.000	
79	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	195.871.000	
80	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	187.168.000	
81	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	207.706.000	
82	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	208.714.000	
83	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	243.803.000	
84	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	215.779.000	
85	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1 Laporan	224.379.000	
86	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	186.994.000	
87	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	215.972.000	
88	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	241.348.000	
89	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	220.969.000	
90	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 Laporan	225.738.000	
91	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	219.379.000	
92	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua	1 Laporan	293.027.000	
93	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	1 Laporan	216.959.000	
94	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	244.307.000	
95	LHP Tematik AKN I	1 LHP	7.954.256.000	
96	LHP Tematik AKN II	1 LHP	7.954.256.000	
97	LHP Tematik AKN III	1 LHP	7.954.256.000	
98	LHP Tematik AKN IV	1 LHP	7.954.256.000	
99	LHP Tematik AKN V	1 LHP	7.954.256.000	
100	LHP Tematik AKN VI	1 LHP	7.954.256.000	
101	LHP Tematik AKN VII	1 LHP	7.954.256.000	
	Pemeriksaan Keuangan Negara			
102	Laporan Hasil Reviu atas SPM Kinerja Pemeriksaan	1 Laporan	189.885.000	
103	Laporan Hasil Pemeriksaan Internal BPK	1 Laporan	186.835.000	
104	Laporan Pemberkasan	1 Laporan	157.054.000	
105	Laporan Reviu Integritas	1 Laporan	167.559.000	
	Pemeriksaan Keuangan Negara			
106	Kurikulum Diklat Jamak	1 Perangkat	46.619.000	
107	Silabus dan Bahan Ajar Diklat Jamak	1 Perangkat	157.796.000	
108	Rancangan Diklat dan Bahan Ajar Diklat Tunggal	1 Perangkat	59.779.000	
109	Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa	1 Angkatan	495.308.000	
110	Diklat Peningkatan Keterampilan SDM	1 Angkatan	144.863.000	
111	Diklat Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara	1 Angkatan	106.129.000	
112	Diklat Registrasi Akuntan Publik	1 Angkatan	102.502.000	
113	Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Internasional	1 Angkatan	96.841.000	
	Pemeriksaan Keuangan Negara			
114	LHP Auditorat Utama Investigasi	1 LHP	665.721.000	
115	Laporan Pendahuluan Informasi Awal	1 Laporan	60.887.000	
116	Laporan Pemberian Keterangan Ahli	1 Laporan	27.312.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
005.02	Kepaniteraan SBK Indeks Biaya Keluaran Perkara Hukum Perseorangan 1 Putusan Perkara Pidana 2 Putusan Perkara Pidana Militer 3 Putusan Perkara PHI yang Nilai Gugatannya di Bawah 150 jt	1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara	1.650.000 950.000 835.000	
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum SBK Indeks Biaya Keluaran Perkara Hukum Perseorangan 1 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Barat 2 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Barat 3 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat 4 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat 5 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat 6 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah 7 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah 8 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah 9 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah 10 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah 11 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur 12 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur 13 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur 14 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur 15 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur	1 perkara 1 perkara 1 perkara 1 perkara 1 perkara 1 perkara 1 perkara 1 perkara 1 perkara 1 perkara 1 perkara 1 perkara 1 perkara 1 perkara 1 perkara	556.000 750.000 770.000 990.000 1.349.000 560.000 765.000 775.000 1.000.000 1.349.000 610.000 970.000 775.000 1.085.000 1.550.000	
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) SBK Indeks Biaya Keluaran Perkara Hukum Perseorangan 1 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Banding di Pengadilan Militer Utama 2 Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama 3 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan 4 Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan 5 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta 6 Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta 7 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 8 Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 9 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 01 Banda Aceh 10 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 02 Medan 11 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 03 Padang 12 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 04 Palembang 13 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 05 Pontianak 14 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 06 Banjarmasin 15 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL I - 07 Balikpapan	1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara	440.000 710.000 1.320.000 400.000 1.380.000 400.000 1.470.000 420.000 1.210.000 1.405.000 1.170.000 1.345.000 1.310.000 1.064.000 1.682.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	16 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL II - 08 Jakarta	1 Perkara	1.274.000	
	17 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL II - 09 Bandung	1 Perkara	1.485.000	
	18 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL II - 10 Semarang	1 Perkara	1.404.000	
	19 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL II - 11 Yogyakarta	1 Perkara	1.515.000	
	20 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL III - 12 Surabaya	1 Perkara	1.345.000	
	21 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL III - 13 Madiun	1 Perkara	1.415.000	
	22 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL III - 14 Denpasar	1 Perkara	1.440.000	
	23 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL III - 15 Kupang	1 Perkara	1.315.000	
	24 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL III - 16 Makassar	1 Perkara	1.455.000	
	25 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL III - 17 Manado	1 Perkara	1.574.000	
	26 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL III - 18 Ambon	1 Perkara	1.525.000	
	27 Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama di Wilayah DILMIL III - 19 Jayapura	1 Perkara	2.660.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Dalam Negeri (010) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
010.01	Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran Layanan Manajemen SDM Internal 1 Literatur 2 Modul 3 RPS/RTM Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 4 Pengabdian Masyarakat Lingkup IPDN SBK Indeks Biaya Keluaran Standarisasi Profesi dan SDM 5 Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri 6 Penilaian Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kemendagri 7 Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri	30 Literatur 77 Modul 190 RPS/RTM 25 Rekomendasi	1.305.430.000 2.422.302.000 1.753.156.000 3.240.568.000	
010.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia SBK Indeks Biaya Keluaran Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 1 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Standarisasi dan Sertifikasi 2 Pengembangan Kompetensi 6 Hari Bidang Standarisasi dan Sertifikasi 3 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 4 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan 5 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Fungsional dan Teknis 6 Pengembangan Kompetensi 12 Hari Bidang Fungsional dan Teknis 7 Pengembangan Kompetensi 14 Hari Bidang Fungsional dan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 8 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Penyusunan Dokumen Perencanaan SPM di Daerah Lingkup Regional	1 Angkatan 1 Angkatan 1 Angkatan 1 Angkatan 1 Angkatan 1 Angkatan 1 Angkatan 1 Angkatan	76.920.000 87.875.000 76.920.000 76.920.000 76.920.000 145.315.000 171.550.000 76.920.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
012.01	Kementerian Pertahanan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan			
1	Bantuan dan Nasihat Hukum di Luar Pengadilan (<i>Non Litigasi</i>)	1 Orang	8.737.000	
	Perkara Hukum Perseorangan			
2	Pendapat dan Saran Hukum (<i>Legal Opinion</i>)	1 Perkara	930.000	
	Perkara Hukum Lembaga			
3	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Laporan	27.107.000	
4	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Laporan	31.606.000	
5	Laporan Dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 1	1 Laporan	9.819.000	
6	Laporan Dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 2	1 Laporan	11.693.000	
7	Laporan Dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 4	1 Laporan	10.355.000	
8	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kasasi Rayon 1	1 Laporan	14.856.000	
9	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kasasi Rayon 2	1 Laporan	16.945.000	
10	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Pk Rayon 1	1 Laporan	15.058.000	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
11	Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 1	1 Orang	5.471.000	
12	Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 2	1 Orang	5.471.000	
13	Kursus Dasar Instruktur Bahasa Inggris	1 Orang	5.471.000	
14	Kursus Intensif Bahasa Inggris <i>Executive</i>	1 Orang	5.471.000	
15	Kursus Intensif Bahasa Inggris Persiapan IELTS	1 Orang	5.471.000	
16	Kursus Intensif Bahasa Inggris Alih Bahasa	1 Orang	5.471.000	
17	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar Gelombang 1	1 Orang	7.103.000	
18	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar Gelombang 2	1 Orang	7.103.000	
19	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar Gelombang 3	1 Orang	7.103.000	
20	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Menengah	1 Orang	7.103.000	
21	Kursus Intensif Bahasa Indonesia bagi Perwira SAF	1 Orang	7.103.000	
22	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Bagi Calon Mahasiswa Asing Unhan Tahap 1	1 Orang	7.015.000	
23	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Bagi Calon Mahasiswa Asing Unhan Tahap 2	1 Orang	7.015.000	
24	Kursus Intensif Bahasa Arab Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
25	Kursus Intensif Bahasa Jepang Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
26	Kursus Intensif Bahasa Jerman Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
27	Kursus Intensif Bahasa Korea Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
28	Kursus Intensif Bahasa Mandarin Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
29	Kursus Intensif Bahasa Perancis Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
30	Kursus Intensif Bahasa Rusia Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000	
31	Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB Gelombang 1	1 Orang	5.471.000	
32	Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB Gelombang 2	1 Orang	5.471.000	
33	Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB Gelombang 3	1 Orang	5.471.000	
34	Kursus Intensif Bahasa Arab bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB	1 Orang	5.471.000	
35	Kursus Intensif Bahasa Prancis bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB Gelombang 1	1 Orang	5.471.000	
36	Kursus Intensif Bahasa Prancis bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB Gelombang 2	1 Orang	5.471.000	
37	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah 1	1 Orang	5.471.000	
38	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah 2	1 Orang	5.471.000	
39	Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan	1 Orang	7.847.600	
40	Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan	1 Orang	6.379.044	
41	Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan	1 Orang	5.541.211	
42	Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Muda	1 Orang	5.931.611	
43	Kursus Dasar Manajemen Pertahanan	1 Orang	5.888.055	
44	Kursus Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pertahanan	1 Orang	5.606.983	
45	Kursus Manajemen Penatausahaan Barang Milik Negara Pertahanan	1 Orang	5.391.755	
46	Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan	1 Orang	5.436.933	
47	Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Pertama	1 Orang	5.610.733	
48	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Tingkat Muda	1 Orang	4.128.000	
49	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pembentukan Auditor Ahli	1 Orang	7.931.000	
50	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	1 Orang	453.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	51 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Terampil	1 Orang	470.000	
	52 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Terapis Gigi Dan Mulut	1 Orang	453.000	
	53 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan Elektronik	1 Orang	663.000	
	54 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Audit Pengadaan Barang Dan Jasa	1 Orang	635.000	
	55 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Presentasi Dengan Model Animasi	1 Orang	556.000	
	56 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pembuatan Presentasi Elektif	1 Orang	556.000	
	57 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pembuatan Video Pembelajaran	1 Orang	556.000	
	58 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tingkat II	1 Orang	5.141.000	
	59 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tingkat III	1 Orang	5.241.000	
	60 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS Gelombang I	1 Orang	5.235.000	
	61 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS Gelombang II	1 Orang	5.235.000	
	62 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS Gelombang III	1 Orang	5.235.000	
	63 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS Gelombang IV	1 Orang	5.235.000	
	64 Latihan Dasar CPNS Kementerian Pertahanan	1 Orang	7.800.000	
	65 Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat Perguruan Tinggi/Setingkat	1 Orang	6.205.000	
	66 Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat SMA/Setingkat	1 Orang	6.205.000	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	67 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I	1 Orang	5.857.690	
	68 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II	1 Orang	5.998.320	
	69 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III	1 Orang	6.281.420	
	70 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	5.893.430	
	71 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V	1 Orang	10.438.400	
	72 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I	1 Orang	41.082.960	
	73 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II	1 Orang	42.164.240	
	74 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III	1 Orang	42.724.440	
	75 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	42.510.560	
	76 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V	1 Orang	49.206.720	
	77 Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I	1 Orang	18.521.580	
	78 Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II	1 Orang	18.978.860	
	79 Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III	1 Orang	19.629.060	
	80 Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	18.965.180	
	81 Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V	1 Orang	24.761.340	
012.21	Markas Besar TNI			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan			
	1 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon I	1 Orang	131.500	
	2 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2	1 Orang	138.500	
	3 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3	1 Orang	141.500	
	4 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4	1 Orang	144.500	
	5 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5	1 Orang	216.500	
	6 Juknis Pembinaan Napi Prajurit	1 Orang	2.520.000	
	Perkara Hukum Perseorangan			
	7 Pengurusan Tahanan Sementara	1 Perkara	49.000	
	8 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	45.530.000	
	9 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	50.530.000	
	10 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	53.890.000	
	11 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	47.060.000	
	12 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	151.670.000	
	13 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 1	1 Perkara	99.660.000	
	14 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 2	1 Perkara	119.860.000	
	15 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 3	1 Perkara	139.910.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	16 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 4	1 Perkara	139.910.000	
	17 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 5	1 Perkara	186.910.000	
	18 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer	1 Perkara	5.144.000	
	19 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	5.158.000	
	20 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	5.778.000	
	21 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	6.273.000	
	22 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	5.324.000	
	23 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	18.851.000	
	24 Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Militer	1 Perkara	8.032.000	
	25 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	1.100.000	
	26 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	1.180.000	
	27 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	1.240.000	
	28 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	1.100.000	
	29 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	2.820.000	
	30 Petunjuk Teknis Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer	1 Perkara	8.070.000	
	31 Lelang Sita Rampasan	1 Perkara	44.285.000	
	32 Eksekusi Orang Dan Barang	1 Perkara	16.778.000	
	33 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I	1 Perkara	18.772.000	
	34 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Bandung	1 Perkara	13.168.000	
	35 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	11.018.000	
	36 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	12.880.000	
	37 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I	1 Perkara	27.502.000	
	38 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	15.373.000	
	39 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	12.081.000	
	40 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	17.812.000	
	41 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I	1 Perkara	44.366.000	
	42 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding	1 Perkara	20.027.000	
	43 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi	1 Perkara	25.927.000	
	44 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK	1 Perkara	23.283.000	
	45 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat TK. I	1 Perkara	118.753.000	
	46 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding	1 Perkara	21.335.000	
	47 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi	1 Perkara	26.641.000	
	48 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK	1 Perkara	26.146.000	
	49 Laporan Bantuan Hukum Non Litigasi	1 Perkara	16.054.000	
	50 Pendapat dan Saran Hukum	1 Perkara	945.000	
	51 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit	1 Perkara	23.530.000	
	52 Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit	1 Perkara	2.255.000	
	53 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana	1 Perkara	13.387.000	
	Operasi Bidang Pertahanan			
	54 Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI	1 Operasi	369.368	
	55 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon I	1 Operasi	115.994	
	56 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon II	1 Operasi	118.094	
	57 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon III	1 Operasi	116.994	
	58 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon IV	1 Operasi	121.194	
	59 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon V	1 Operasi	124.294	
	60 Rahwan Rayon I	1 Operasi	146.994	
	61 Rahwan Rayon II	1 Operasi	149.094	
	62 Rahwan Rayon III	1 Operasi	148.094	
	63 Rahwan Rayon IV	1 Operasi	152.194	
	64 Rahwan Rayon V	1 Operasi	155.294	
	65 Seleksi Satgas Yonmek UNIFIL	1 Operasi	2.298.031	
	66 Kegiatan Satgas Yonmek UNIFIL	1 Operasi	6.906.605	
	67 Purna Tugas Satgas Yonmek UNIFIL	1 Operasi	1.908.988	
	68 Seleksi 6 Satgas UNIFIL	1 Operasi	2.713.268	
	69 Kegiatan 6 Satgas UNIFIL	1 Operasi	3.275.323	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	70 Kegiatan Satgas FPC UNIFIL	1 Operasi	2.809.592	
	71 Kegiatan Satgas MPU UNIFIL	1 Operasi	5.975.000	
	72 Kegiatan Satgas FHQSU UNIFIL	1 Operasi	7.658.666	
	73 Kegiatan Satgas MCOU UNIFIL	1 Operasi	11.664.444	
	74 Kegiatan Satgas CIMIC UNIFIL	1 Operasi	27.919.857	
	75 Kegiatan Satgas Level II UNIFIL	1 Operasi	21.568.777	
	76 Gabungan Gelar Siap dan Rotasi 6 Satgas UNIFIL	1 Operasi	3.635.703	
	77 Gabungan Purna Tugas 6 Satgas UNIFIL	1 Operasi	2.479.401	
	78 Seleksi Satgas MTF	1 Operasi	5.202.719	
	79 Kegiatan Satgas MTF	1 Operasi	10.485.766	
	80 Purna Tugas Satgas MTF	1 Operasi	1.758.757	
	81 Seleksi Satgas Yon RDB MONUSCO	1 Operasi	2.244.061	
	82 Kegiatan Satgas Yon RDB MONUSCO	1 Operasi	7.343.914	
	83 Purna Tugas Satgas Yon RDB MONUSCO	1 Operasi	1.872.352	
	84 Seleksi Satgas Yon KIZI MONUSCO	1 Operasi	3.528.085	
	85 Kegiatan Satgas Yon KIZI MONUSCO	1 Operasi	6.822.045	
	86 Gelar Siap dan Rotasi Satgas KIZI MONUSCO	1 Operasi	2.430.685	
	87 Purna Tugas Satgas KIZI MONUSCO	1 Operasi	1.524.834	
	88 Seleksi Satgas Kizi Minusca Car	1 Operasi	3.188.757	
	89 Kegiatan Satgas Minusca Car	1 Operasi	8.195.840	
	90 Purna Tugas Satgas Kizi Minusca Car	1 Operasi	1.782.980	
	91 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon I	1 Operasi	76.688	
	92 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon II	1 Operasi	80.788	
	93 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon III	1 Operasi	79.788	
	94 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon IV	1 Operasi	81.888	
	95 Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon V	1 Operasi	83.888	
	96 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon I	1 Operasi	163.648	
	97 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon II	1 Operasi	166.648	
	98 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon III	1 Operasi	172.748	
	99 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon IV	1 Operasi	173.748	
	100 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon V	1 Operasi	181.848	
	101 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon I	1 Operasi	124.441	
	102 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon II	1 Operasi	131.441	
	103 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon III	1 Operasi	130.441	
	104 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon IV	1 Operasi	136.441	
	105 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon V	1 Operasi	139.441	
	106 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Terpusat	1 Operasi	230.520	
	107 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon I	1 Operasi	244.657	
	108 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon II	1 Operasi	251.657	
	109 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon III	1 Operasi	250.657	
	110 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon IV	1 Operasi	256.657	
	111 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon V	1 Operasi	259.657	
	112 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon I	1 Operasi	107.605	
	113 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon II	1 Operasi	114.605	
	114 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon III	1 Operasi	113.605	
	115 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon IV	1 Operasi	119.605	
	116 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon V	1 Operasi	122.605	
	117 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon I	1 Operasi	99.106	
	118 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon II	1 Operasi	106.106	
	119 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon III	1 Operasi	105.106	
	120 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon IV	1 Operasi	111.106	
	121 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon V	1 Operasi	114.106	
	122 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Pamtas, Pam Rahwan dan Pam Puter	1 Operasi	183.130	
	123 Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI	1 Operasi	478.911	
	124 Peserta Operasi Siber TNI	1 Operasi	288.230	
	Operasi Bidang Keamanan			
	125 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah I	1 Operasi	159.455	
	126 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah II	1 Operasi	169.375	
	127 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah III	1 Operasi	168.135	
	128 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah IV	1 Operasi	174.335	
	129 Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah V	1 Operasi	186.735	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
130	Seleksi Penerimaan (<i>Werving</i>) Calon Pa PK TNI	1 Orang	18.239.615	
131	Seleksi Penerimaan (<i>Werving</i>) Calon Pa PSDP Pnb TNI	1 Orang	19.493.885	
132	Seleksi Penerimaan (<i>Werving</i>) Mahasiswa Beasiswa TNI Calon	1 Orang	19.940.269	
133	Penerimaan CPNS UO Mabes TNI	1 Orang	1.650.325	
134	Diklat Alih PNS	1 Orang	7.336.875	
135	Lulusan Dikma Chandradimuka Capratar (Pria)	1 Orang	45.291.000	
136	Lulusan Dikma Chandradimuka Capratar (Wanita)	1 Orang	51.476.400	
137	Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar	1 Orang	10.140.000	
138	Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar Lanjutan	1 Orang	5.070.000	
139	Pendidikan Pertama PSDP Penerbang TNI	1 Orang	28.700.028	
140	Pendidikan Lanjutan PSDP PNB TNI	1 Orang	147.109.714	
141	Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Pria TNI	1 Orang	70.295.417	
142	Pendidikan Pertama PA PK Wanita TNI	1 Orang	74.338.487	
143	Seleksi Casis Dikreg Sesko TNI	1 Orang	6.249.385	
144	Lulusan Sesko TNI	1 Orang	56.790	
145	Dikopsgab Sesko TNI	1 Orang	83.698	
146	Taropsgab Sesko TNI	1 Orang	72.143	
147	Lulusan Dikbangspes Suspa TNI	1 Orang	15.020.250	
148	Lulusan Dikbangspes Susba TNI	1 Orang	13.226.000	
149	Lulusan Dikbangspes SIP TNI	1 Orang	89.483.500	
150	Lulusan Dikbangspes Susjabkimd	1 Orang	15.534.250	
151	Lulusan Dikbangspes Susjabormil	1 Orang	16.782.500	
152	Lulusan Dikbangspes Susgati Bintal	1 Orang	15.500.800	
153	Lulusan Dik SAR TNI	1 Orang	15.566.000	
154	Lulusan Kursus Penanggulangan Bencana Alam	1 Orang	15.557.000	
155	Kursus Dasar Perwira Intelijen	1 Orang	5.165.000	
156	Kursus Perwira Kontra Intelijen	1 Orang	5.396.000	
157	Kursus Perwira Intelijen Strategis	1 Orang	5.090.000	
158	Kursus Perwira Sandi Dan Intelijen	1 Orang	4.797.777	
159	Kursus Bintara Sandi Dan Intelijen	1 Orang	4.537.500	
160	Kursus Dasar Bintara Intelijen	1 Orang	4.590.000	
161	Kursus Perwira Siber Dan Intelijen	1 Orang	5.674.074	
162	Kursus Bintara Siber Dan Intelijen	1 Orang	5.533.333	
163	Kursus Perwira Intelijen Medis	1 Orang	5.373.333	
164	Kursus Perwira Intelijen Ekonomi	1 Orang	5.970.833	
165	Pembekalan Intelijen	1 Orang	1.200.000	
166	Kursus Perwira Interogator	1 Orang	6.078.000	
167	Kursus Bintara Interogator	1 Orang	5.950.000	
168	Seleksi Kursus Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.674.454	
169	Kursus Bahasa Inggris Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.211.262	
170	Kursus Komputer Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.725.303	
171	Kursus Sandi Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.725.303	
172	Seleksi Kursus Atase Pertahanan RI	1 Orang	4.860.575	
173	Seleksi Kursus Perwira Intelijen	1 Orang	876.562	
174	Seleksi Kursus Bintara Intelijen	1 Orang	851.562	
175	Penataran/Latihan Gabungan Bangspes	1 Orang	167.000	
176	Penataran/Latihan PA Bangspes	1 Orang	167.000	
177	Penataran/Latihan BA Bangspes	1 Orang	165.750	
178	Penataran/Latihan TA Bangspes	1 Orang	164.500	
179	Sekolah Manajemen Dan Analisis Intelijen (SMAI)	1 Orang	10.646.000	
180	Kursus Perwira Intelijen Teknik	1 Orang	5.946.666	
181	Kursus Bintara Intelijen Teknik	1 Orang	5.760.000	
182	Kursus Perwira Intelijen Strategis Atase Pertahanan RI	1 Orang	4.843.418	
183	Kursus Perwira Penggalangan	1 Orang	5.560.000	
184	Kursus Perwira PCI	1 Orang	5.519.733	
185	Kursus Perwira Litpers	1 Orang	5.560.000	
186	Kursus Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.731.497	
187	Penataran Istri Kursus Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.177.924	
188	Kursus Dasar Perwira Intelijen Teritorial	1 Orang	5.413.777	
189	Kursus Dasar Bintara Intelijen Teritorial	1 Orang	4.572.666	
190	Lulusan Sekbang Terpadu TNI	1 Orang	9.798.272	
191	Kursus Sandi Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.651.915	
192	Kursus Perwira Intelijen Strategis Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.400.000	
193	Kursus Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.900.000	
194	Penataran Istri Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.131.212	
195	Kursus Bahasa Inggris Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.907.395	
196	Kursus Komputer Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.651.915	
197	Lulusan Kursus Perwira Siber TNI	1 Orang	17.018.000	
198	Seleksi Sus Jab Oditor Militer	1 Orang	6.188.333	
199	Seleksi Sus Jab Hakim Militer	1 Orang	6.188.333	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
200	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	1.371.575	
201	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	125.612	
202	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah I	1 Orang	142.138	
203	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah II	1 Orang	142.738	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	204 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah III	1 Orang	143.338	
	205 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah IV	1 Orang	143.938	
	206 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah V	1 Orang	144.538	
	207 Peserta Latihan Menembak Senjata Ringan Balakpus TNI	1 Orang	163.616	
	208 Peserta Latihan Fungsi Teknis Balakpus TNI	1 Orang	134.875	
	209 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah I)	1 Orang	106.104	
	210 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah II)	1 Orang	108.633	
	211 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah III)	1 Orang	113.804	
	212 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah IV)	1 Orang	118.975	
	213 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah V)	1 Orang	127.004	
	214 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah I)	1 Orang	101.407	
	215 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah II)	1 Orang	103.691	
	216 Peserta Latihan Pratugas Operasi Satgas Intel	1 Orang	165.159	
012.22	Markas Besar TNI AD			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	1 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	3.500.000	
	2 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	4.000.000	
	3 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	4.500.000	
	4 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	5.000.000	
	5 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	5.500.000	
	6 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Terpusat)	1 Orang	5.000.000	
	7 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Terpusat)	1 Orang	5.500.000	
	8 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Terpusat)	1 Orang	6.000.000	
	9 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Terpusat)	1 Orang	6.500.000	
	10 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Terpusat)	1 Orang	7.000.000	
	11 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar)	1 Orang	6.000.000	
	12 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar)	1 Orang	6.500.000	
	13 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar)	1 Orang	7.000.000	
	14 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar)	1 Orang	7.500.000	
	15 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar)	1 Orang	8.000.000	
	16 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	7.000.000	
	17 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	7.500.000	
	18 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	8.000.000	
	19 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	8.500.000	
	20 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	9.000.000	
	21 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	4.000.000	
	22 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	4.500.000	
	23 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	5.000.000	
	24 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	5.500.000	
	25 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	6.000.000	
	26 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	3.000.000	
	27 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	3.500.000	
	28 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	4.000.000	
	29 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	4.500.000	
	30 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	5.000.000	
	31 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	1.500.000	
	32 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	2.000.000	
	33 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	2.500.000	
	34 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	3.000.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	35 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korcm Materi Latorsar Ter)	1 Orang	3.500.000	
	36 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	3.500.000	
	37 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	4.000.000	
	38 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	4.500.000	
	39 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	5.000.000	
	40 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	5.500.000	
	41 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	4.000.000	
	42 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	4.500.000	
	43 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	5.000.000	
	44 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	5.500.000	
	45 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)	1 Orang	6.000.000	
	46 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Orang	1.000.000	
	47 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Orang	1.500.000	
	48 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Orang	2.000.000	
	49 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Orang	2.500.000	
	50 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)	1 Orang	3.000.000	
	51 Latihan Bersama Internasional di LN dengan (Gun Pesawat Komersil)	1 Orang	3.645.295.000	
	52 Latihan Bersama Internasional di LN dengan (Gun Pesawat TNI AU)	1 Orang	3.513.740.000	
	53 Latihan Bersama di DN Tanpa Alutsista	1 Orang	1.236.210.000	
	54 Latihan Bersama Internasional di DN dengan Pelibatan Alutsista	1 Orang	1.373.555.000	
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan			
	55 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I	1 Orang	6.555.000	
	56 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II	1 Orang	7.016.000	
	57 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III	1 Orang	7.348.000	
	58 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV	1 Orang	6.705.000	
	59 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V	1 Orang	16.345.000	
	60 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Orang	2.521.000	
	61 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Orang	2.511.000	
	62 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Orang	2.950.000	
	63 Pendapat dan Saran Hukum Pidana (PSH Pidana)	1 Orang	906.000	
	64 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I	1 Orang	13.498.000	
	65 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II	1 Orang	15.392.000	
	66 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III	1 Orang	16.707.000	
	67 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV	1 Orang	14.039.000	
	68 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V	1 Orang	52.727.000	
	69 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Orang	4.621.000	
	70 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Orang	3.548.000	
	71 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Orang	6.370.000	
	72 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon I	1 Orang	29.157.000	
	73 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon II	1 Orang	33.280.000	
	74 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon III	1 Orang	36.227.000	
	75 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon IV	1 Orang	30.499.000	
	76 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon V	1 Orang	120.478.000	
	77 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon I	1 Orang	8.473.000	
	78 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon II	1 Orang	9.222.000	
	79 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon III	1 Orang	9.758.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	80 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon IV	1 Orang	8.687.000	
	81 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon V	1 Orang	24.912.000	
	82 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Orang	14.163.000	
	83 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Orang	15.502.000	
	84 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Orang	16.520.000	
	85 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Orang	15.127.000	
	86 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Orang	40.091.000	
	87 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon I	1 Orang	12.004.000	
	88 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon II	1 Orang	12.807.000	
	89 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon III	1 Orang	13.396.000	
	90 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV	1 Orang	12.379.000	
	91 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon V	1 Orang	28.753.000	
	92 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I	1 Orang	27.107.000	
	93 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon II	1 Orang	31.606.000	
	94 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon III	1 Orang	34.820.000	
	95 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon IV	1 Orang	28.392.000	
	96 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V	1 Orang	127.668.000	
	97 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon I	1 Orang	9.819.000	
	98 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon II	1 Orang	11.693.000	
	99 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon III	1 Orang	13.032.000	
	100 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon IV	1 Orang	10.355.000	
	101 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon V	1 Orang	51.014.000	
	102 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Orang	14.856.000	
	103 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Orang	16.945.000	
	104 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Orang	18.498.000	
	105 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Orang	16.034.000	
	106 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Orang	57.116.000	
	107 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I	1 Orang	15.058.000	
	108 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon II	1 Orang	18.057.000	
	109 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon III	1 Orang	20.200.000	
	110 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon IV	1 Orang	15.915.000	
	111 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon V	1 Orang	80.734.000	
	112 Pendapat dan Saran Hukum Perdata (PSH Perdata)	1 Orang	906.000	
	113 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 1	1 Orang	10.290.000	
	114 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 2	1 Orang	10.999.000	
	115 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 3	1 Orang	11.818.000	
	116 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 4	1 Orang	12.182.000	
	117 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon V	1 Orang	43.411.000	
	Perkara Hukum Perseorangan			
	118 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I	1 Perkara	9.365.000	
	119 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II	1 Perkara	10.070.000	
	120 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III	1 Perkara	10.545.000	
	121 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV	1 Perkara	9.645.000	
	122 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V	1 Perkara	23.450.000	
	123 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon I	1 Perkara	6.242.000	
	124 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon II	1 Perkara	6.642.000	
	125 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon III	1 Perkara	6.902.000	
	126 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon IV	1 Perkara	6.357.000	
	127 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon V	1 Perkara	13.917.000	
	128 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I	1 Perkara	2.315.000	
	129 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II	1 Perkara	2.480.000	
	130 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III	1 Perkara	2.585.000	
	131 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV	1 Perkara	2.353.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	132 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V	1 Perkara	5.700.000	
	133 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I	1 Perkara	9.970.000	
	134 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II	1 Perkara	10.400.000	
	135 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III	1 Perkara	11.000.000	
	136 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV	1 Perkara	10.000.000	
	137 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V	1 Perkara	13.000.000	
	138 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon I	1 Perkara	13.201.000	
	139 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon II	1 Perkara	13.865.000	
	140 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon III	1 Perkara	15.035.000	
	141 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon IV	1 Perkara	13.370.000	
	142 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon V	1 Perkara	17.380.000	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	143 Koptar Pria	1 Orang	4.943.000	
	144 Koptar Wanita	1 Orang	4.943.000	
	145 Sertar Pria	1 Orang	5.171.000	
	146 Sertar Wanita	1 Orang	5.171.000	
	147 Sermadatar Pria	1 Orang	5.357.000	
	148 Sermadatar Wanita	1 Orang	5.357.000	
	149 Sermatutar Pria	1 Orang	5.577.000	
	150 Sermatutar Wanita	1 Orang	5.577.000	
	151 Dikmaba Pria Rayon I	1 Orang	3.593.000	
	152 Dikmaba Pria Rayon II	1 Orang	3.643.000	
	153 Dikmaba Pria Rayon III	1 Orang	3.808.000	
	154 Dikmaba Pria Rayon IV	1 Orang	3.857.000	
	155 Dikmaba Pria Rayon V	1 Orang	4.051.000	
	156 Dikmaba Wanita	1 Orang	3.593.000	
	157 Dikmata Rayon I	1 Orang	3.373.000	
	158 Dikmata Rayon II	1 Orang	3.423.000	
	159 Dikmata Rayon III	1 Orang	3.588.000	
	160 Dikmata Rayon IV	1 Orang	3.627.000	
	161 Dikmata Rayon V	1 Orang	3.821.000	
	162 Pra Dikma Tamtama	1 Orang	3.673.000	
	163 Werving Taruna Matra Darat	1 Orang	26.607.610	
	164 Werving Bintara Umum Matra Darat	1 Orang	6.652.977	
	165 Werving Tamtama Matra Darat Umum	1 Orang	5.099.526	
	166 Diktukpa Reg/Sus	1 Orang	3.975.000	
	167 Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon I	1 Orang	3.539.000	
	168 Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon II	1 Orang	3.586.000	
	169 Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon III	1 Orang	3.754.000	
	170 Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	3.804.000	
	171 Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon V	1 Orang	4.003.000	
	172 Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon I	1 Orang	1.642.000	
	173 Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon II	1 Orang	1.683.000	
	174 Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon III	1 Orang	1.690.000	
	175 Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	1.719.000	
	176 Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon V	1 Orang	1.727.000	
	177 Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon I	1 Orang	1.271.000	
	178 Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon II	1 Orang	1.285.000	
	179 Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon III	1 Orang	1.324.000	
	180 Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	1.344.000	
	181 Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon V	1 Orang	1.387.000	
	182 Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon I	1 Orang	45.803	
	183 Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon II	1 Orang	46.004	
	184 Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon III	1 Orang	47.558	
	185 Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon IV	1 Orang	47.851	
	186 Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon V	1 Orang	49.610	
	187 Pendidikan Seskoad	1 Orang	5.090.000	
	188 Diklapa I/Diklapa II Cab Satpur/Banpur	1 Orang	4.148.000	
	189 Diklapa I/Diklapa II Cab Banmin	1 Orang	3.927.000	
	190 Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon I	1 Orang	6.143.000	
	191 Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon II	1 Orang	6.153.000	
	192 Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon III	1 Orang	6.218.000	
	193 Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon IV	1 Orang	6.211.000	
	194 Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon V	1 Orang	6.292.000	
	195 Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon I	1 Orang	4.104.000	
	196 Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon II	1 Orang	4.064.000	
	197 Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon III	1 Orang	4.188.000	
	198 Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon IV	1 Orang	4.242.000	
	199 Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon V	1 Orang	4.270.000	
	200 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1 Orang	96.556	
	201 Dikbangspespa Cab Satpur/Banpur	1 Orang	3.917.000	
	202 Dikbangspespa Cab Banmin	1 Orang	3.717.000	
	203 Dikcab Perwira Satpur/Banpur	1 Orang	5.256.000	
	204 Dikcab Perwira Banmin	1 Orang	5.011.000	
	205 Dikbangspesba Rayon I	1 Orang	3.274.000	
	206 Dikbangspesba Rayon II	1 Orang	3.322.000	
	207 Dikbangspesba Rayon III	1 Orang	3.480.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	208 Dikbangspesba Rayon IV	1 Orang	3.520.000	
	209 Dikbangspesba Rayon V	1 Orang	3.706.000	
	210 Dikjur Bintara Rayon I	1 Orang	3.355.000	
	211 Dikjur Bintara Rayon II	1 Orang	3.414.000	
	212 Dikjur Bintara Rayon III	1 Orang	3.565.000	
	213 Dikjur Bintara Rayon IV	1 Orang	3.615.000	
	214 Dikjur Bintara Rayon V	1 Orang	3.796.000	
	215 Diklatnis PNS	1 Orang	53.135	
	216 Dikbangspesta Rayon I	1 Orang	3.143.000	
	217 Dikbangspesta Rayon II	1 Orang	3.190.000	
	218 Dikbangspesta Rayon III	1 Orang	3.323.000	
	219 Dikbangspesta Rayon IV	1 Orang	3.363.000	
	220 Dikbangspesta Rayon V	1 Orang	3.560.000	
	221 Dikjur Tamtama Rayon I	1 Orang	3.213.000	
	222 Dikjur Tamtama Rayon II	1 Orang	3.268.000	
	223 Dikjur Tamtama Rayon III	1 Orang	3.422.000	
	224 Dikjur Tamtama Rayon IV	1 Orang	3.464.000	
	225 Dikjur Tamtama Rayon V	1 Orang	3.647.000	
	226 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon I	1 Orang	1.196.000	
	227 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon II	1 Orang	1.251.000	
	228 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon III	1 Orang	1.256.000	
	229 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon IV	1 Orang	1.261.000	
	230 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon V	1 Orang	1.306.000	
	231 Pendidikan Keahlian Rayon I	1 Orang	3.881.000	
	232 Pendidikan Keahlian Rayon II	1 Orang	3.920.000	
	233 Pendidikan Keahlian Rayon III	1 Orang	4.089.000	
	234 Pendidikan Keahlian Rayon IV	1 Orang	4.142.000	
	235 Pendidikan Keahlian Rayon V	1 Orang	4.339.000	
	236 Pendidikan Komando dan Gultor	1 Orang	5.099.000	
	237 Pendidikan Spesialisasi Pasukan Khusus	1 Orang	3.976.000	
	238 Dik Iptek S-1	1 Orang	3.816.000	
	239 Dik Iptek D-3 (Rayon I)	1 Orang	3.204.000	
	240 Dik Iptek D-3 (Rayon II)	1 Orang	3.248.000	
	241 Dik Iptek D-3 (Rayon III)	1 Orang	3.419.000	
	242 Dik Iptek D-3 (Rayon IV)	1 Orang	3.468.000	
	243 Dik Iptek D-3 (Rayon V)	1 Orang	3.667.000	
	244 Dik Iptek SMK (Rayon I)	1 Orang	3.148.000	
	245 Dik Iptek SMK (Rayon II)	1 Orang	3.197.000	
	246 Dik Iptek SMK (Rayon III)	1 Orang	3.363.000	
	247 Dik Iptek SMK (Rayon IV)	1 Orang	3.407.000	
	248 Dik Iptek SMK (Rayon V)	1 Orang	3.596.000	
	249 Dik Iptek D4 Matra Darat	1 Orang	3.746.000	
	250 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon I	1 Orang	1.833.000	
	251 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon II	1 Orang	1.841.000	
	252 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon III	1 Orang	1.872.000	
	253 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon IV	1 Orang	1.876.000	
	254 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon V	1 Orang	1.901.000	
012.23	Markas Besar TNI AL			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	1 Latihan Kematraan	1 Orang	105.000	
	2 Latihan Pasukan Khusus	1 Orang	204.000	
	3 Latihan Satuan	1 Orang	99.000	
	4 Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	856.000	
	5 Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	154.000	
	6 Latihan Perorangan Marinir	1 Orang	30.000	
	7 Latihan Teknis Marinir	1 Orang	93.000	
	8 Latihan Taktis Marinir	1 Orang	84.000	
	9 Latihan Perorangan Pasukan Khusus TNI AL	1 Orang	45.000	
	10 Latihan Teknis Pasukan Khusus TNI AL	1 Orang	133.000	
	11 Latihan Taktis Pasukan Khusus TNI AL	1 Orang	204.000	
	12 Latihan Intelegen TNI AL	1 Orang	295.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan			
13	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Orang	9.365.000	
14	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Orang	10.070.000	
15	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Orang	10.545.000	
16	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Orang	9.645.000	
17	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Orang	23.450.000	
18	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1	1 Orang	6.242.000	
19	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2	1 Orang	6.642.000	
20	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3	1 Orang	6.902.000	
21	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4	1 Orang	6.357.000	
22	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5	1 Orang	13.917.000	
23	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Orang	2.315.000	
24	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Orang	2.480.000	
25	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Orang	2.585.000	
26	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Orang	2.355.000	
27	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Orang	5.700.000	
28	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Orang	9.970.000	
29	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Orang	10.400.000	
30	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Orang	11.000.000	
31	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Orang	10.000.000	
32	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Orang	13.000.000	
	Perkara Hukum Perseorangan			
33	Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Di Laut	1 Perkara	52.259.000	
34	Pendapat Dan Saran Hukum Tindak Pidana Tertentu Di Laut	1 Perkara	938.000	
35	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1	1 Perkara	6.555.000	
36	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1 Perkara	7.016.000	
37	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Perkara	7.348.000	
38	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Perkara	6.705.000	
39	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Perkara	16.345.000	
40	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	2.521.000	
41	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	2.511.000	
42	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	2.950.000	
43	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Militer	1 Perkara	906.000	
44	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Perkara	13.498.000	
45	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Perkara	15.392.000	
46	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Perkara	16.707.000	
47	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Perkara	14.039.000	
48	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Perkara	52.727.000	
49	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	4.621.000	
50	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	3.548.000	
51	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	6.370.000	
52	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Umum	1 Perkara	906.000	
53	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Layanan	29.157.000	
54	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Layanan	33.280.000	
55	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Layanan	36.227.000	
56	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Layanan	30.499.000	
57	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Layanan	120.478.000	
58	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 1	1 Perkara	8.473.000	
59	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 2	1 Layanan	9.222.000	
60	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 3	1 Layanan	9.758.000	
61	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 4	1 Layanan	8.687.000	
62	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 5	1 Layanan	24.912.000	
63	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	14.163.000	
64	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	15.502.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	65 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	16.520.000	
	66 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	15.127.000	
	67 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Layanan	40.091.000	
	68 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	12.004.000	
	69 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	12.807.000	
	70 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	13.396.000	
	71 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Layanan	12.379.000	
	72 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Layanan	28.753.000	
	73 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Layanan	27.107.000	
	74 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Layanan	31.606.000	
	75 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Layanan	34.820.000	
	76 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Layanan	28.392.000	
	77 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Layanan	127.668.000	
	78 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Layanan	9.819.000	
	79 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Layanan	11.693.000	
	80 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Layanan	13.032.000	
	81 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Layanan	10.355.000	
	82 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Layanan	51.014.000	
	83 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	14.856.000	
	84 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	16.945.000	
	85 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	18.498.000	
	86 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	16.034.000	
	87 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Layanan	57.116.000	
	88 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	15.058.000	
	89 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	18.057.000	
	90 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	20.200.000	
	91 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	15.915.000	
	92 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	80.734.000	
	93 Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 1	1 Perkara	10.290.000	
	94 Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 2	1 Perkara	10.999.000	
	95 Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 3	1 Perkara	11.818.000	
	96 Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 4	1 Perkara	12.182.000	
	97 Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 5	1 Perkara	43.411.000	
	98 Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Penggugat	1 Perkara	906.000	
	99 Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Tergugat	1 Perkara	906.000	
	100 Penyelidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut	1 Perkara	8.480.000	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	101 Werving Calon Taruna/Taruni AAL	1 Orang	25.747.000	
	102 Werving Calon Bintara Matra Laut	1 Orang	6.437.000	
	103 Werving Calon Tamtama Matra Laut	1 Orang	4.661.000	
	104 Peserta Diklapa	1 Orang	3.952.000	
	105 Peserta Diktukpa Reguler dan Singkat	1 Orang	3.154.000	
	106 Peserta Diktukba Reguler dan Singkat	1 Orang	3.566.000	
	107 Peserta Kursus Manajemen Strategik	1 Orang	4.810.000	
	108 Peserta Seskoad	1 Orang	5.101.000	
	109 Seleksi Dik D-3 STTAL	1 Orang	3.752.000	
	110 Seleksi Dik S-1 STTAL	1 Orang	3.904.000	
	111 Seleksi Dik S-2 STTAL	1 Orang	3.977.000	
	112 Peserta Dikspespa	1 Orang	2.771.000	
	113 Peserta Dikspesba	1 Orang	2.679.000	
	114 Peserta Dik Brevet	1 Orang	4.345.000	
	115 Peserta Penerbang TNI AL	1 Orang	6.620.000	
	116 Dikma Koptar Pria	1 Orang	4.918.000	
	117 Dikma Koptar Wanita	1 Orang	4.918.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	118 Dikma Sertar Pria	1 Orang	6.667.000	
	119 Dikma Sertar Wanita	1 Orang	6.667.000	
	120 Dikma Sernadatar Pria	1 Orang	6.952.000	
	121 Dikma Sernadatar Wanita	1 Orang	6.952.000	
	122 Dikma Sernatutur Pria	1 Orang	7.297.000	
	123 Dikma Sernatutur Wanita	1 Orang	7.297.000	
	124 Diksargolan Perwira/PA PK Matra Laut	1 Orang	5.520.000	
	125 Dikma Bintara Pria Matra Laut	1 Orang	3.947.000	
	126 Dikma Bintara Wanita Matra Laut	1 Orang	3.947.000	
	127 Diksargolan Bintara Matra Laut	1 Orang	3.707.000	
	128 Dikma Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.591.000	
	129 Diksargolan Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.389.000	
	130 Dik Seskoal	1 Orang	5.787.000	
	131 Diklapa Matra Laut	1 Orang	4.082.000	
	132 Diktukpa Matra Laut	1 Orang	3.830.000	
	133 Diklukba Matra Laut	1 Orang	3.639.000	
	134 Dikbangsus Perwira Matra Laut	1 Orang	4.150.000	
	135 Dikbangsus Bintara Matra Laut	1 Orang	3.616.000	
	136 Dikbangsus Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.371.000	
	137 Diksus Manajemen Strategik Matra Laut	1 Orang	4.304.000	
	138 Diksus Pencrbang Matra Laut	1 Orang	5.803.000	
	139 Diksus Brevet Matra Laut	1 Orang	4.694.000	
	140 Dik STTAL D-3	1 Orang	3.572.000	
	141 Dik STTAL S-1	1 Orang	3.936.000	
	142 Dik S-2 STTAL	1 Orang	4.248.000	
012.24	Markas Besar TNI AU			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	1 Peserta Latihan Kematraan	1 Orang	651.000.000	
	2 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	10.353.448.000	
	3 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	957.599.000	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	4 Werung Taruna/Taruni	1 Orang	27.382.760	
	5 Werung Bintara Matra Udara	1 Orang	6.845.767	
	6 Werung Tamtama Matra Udara	1 Orang	4.956.922	
	7 Peserta Seskoau dan Sessau Matra Udara	1 Orang	2.561.700	
	8 Seleksi Sekkau dan Suspajemen Matra Udara	1 Orang	1.756.200	
	9 Peserta Setukpa Matra Udara	1 Orang	1.587.060	
	10 Peserta Setukba Matra Udara	1 Orang	1.363.620	
	11 Sertar Pria	1 Orang	75.255.180	
	12 Sertar Wanita	1 Orang	75.255.180	
	13 Pendidikan Sernadatar Pria	1 Orang	78.148.970	
	14 Pendidikan Sernadatar Wanita	1 Orang	78.148.970	
	15 Pendidikan Sernatutur Pria	1 Orang	82.961.360	
	16 Pendidikan Sernatutur Wanita	1 Orang	82.961.360	
	17 Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara	1 Orang	5.478.210	
	18 Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara	1 Orang	3.265.690	
	19 Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara	1 Orang	3.265.690	
	20 Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara Non ISD	1 Orang	3.304.941	
	21 Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara ISD	1 Orang	3.304.941	
	22 Pendidikan Pertama Secalam Pria Matra Udara	1 Orang	2.943.610	
	23 Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara	1 Orang	3.005.358	
	24 Pendidikan Sekbang/Seknav Matra Udara	1 Orang	7.054.322	
	25 Pendidikan Sekbang/Seknav Matra Udara Lanjutan	1 Orang	7.054.323	
	26 Pendidikan SIP/SIN Matra Udara	1 Orang	6.973.188	
	27 Pendidikan Seskoau	1 Orang	5.064.263	
	28 Pendidikan Sessau	1 Orang	4.910.030	
	29 Pendidikan Sekkau	1 Orang	3.886.550	
	30 Pendidikan Suspajemen	1 Orang	3.817.000	
	31 Pendidikan Setukpa	1 Orang	3.642.843	
	32 Pendidikan Setukba	1 Orang	3.390.143	
	33 Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	3.612.758	
	34 Dikbangspes Bintara Matra Udara	1 Orang	3.027.750	
	35 Dikbangspes Tamtama Matra Udara	1 Orang	2.933.208	
	36 Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	813.120	
	37 Seleksi Dikbangspes Ba/Ta Matra Udara	1 Orang	699.920	
	38 Koptar Pria	1 Orang	32.029.600	
	39 Koptar Wanita	1 Orang	32.029.600	
	Perkara Hukum Perseorangan			
	40 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Perkara	9.365.000	
	41 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Perkara	10.070.000	
	42 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Perkara	10.545.000	
	43 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Perkara	9.645.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	44 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Perkara	23.450.000	
	45 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1	1 Perkara	6.242.000	
	46 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2	1 Perkara	6.642.000	
	47 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3	1 Perkara	6.902.000	
	48 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4	1 Perkara	6.357.000	
	49 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5	1 Perkara	13.917.000	
	50 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Perkara	2.315.000	
	51 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Perkara	2.480.000	
	52 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Perkara	2.585.000	
	53 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Perkara	2.355.000	
	54 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Perkara	5.700.000	
	55 Pengurus Tahanan Sementara Rayon 1	1 Perkara	49.850	
	56 Pengurus Tahanan Sementara Rayon 2	1 Perkara	52.000	
	57 Pengurus Tahanan Sementara Rayon 3	1 Perkara	55.000	
	58 Pengurus Tahanan Sementara Rayon 4	1 Perkara	50.000	
	59 Pengurus Tahanan Sementara Rayon 5	1 Perkara	65.000	
	60 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 1	1 Perkara	5.795.000	
	61 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 2	1 Perkara	7.016.000	
	62 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 3	1 Perkara	7.348.000	
	63 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 4	1 Perkara	6.705.000	
	64 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 5	1 Perkara	16.345.000	
	65 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. Banding	1 Perkara	2.521.000	
	66 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. Kasasi	1 Perkara	2.511.000	
	67 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. PK	1 Perkara	2.950.000	
	68 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Perkara	13.498.000	
	69 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Perkara	15.392.000	
	70 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Perkara	16.707.000	
	71 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Perkara	14.039.000	
	72 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Perkara	76.127.000	
	73 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	4.621.000	
	74 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	3.548.000	
	75 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	6.370.000	
	76 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 1	1 Perkara	29.157.000	
	77 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 2	1 Perkara	33.280.000	
	78 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 3	1 Perkara	36.227.000	
	79 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 4	1 Perkara	30.499.000	
	80 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 5	1 Perkara	120.478.000	
	81 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 1	1 Perkara	8.473.000	
	82 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 2	1 Perkara	9.222.000	
	83 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 3	1 Perkara	9.758.000	
	84 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 4	1 Perkara	8.687.000	
	85 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 5	1 Perkara	24.912.000	
	86 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	14.163.000	
	87 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	15.502.000	
	88 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	16.520.000	
	89 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	15.327.000	
	90 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	40.091.000	
	91 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	12.004.000	
	92 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	12.807.000	
	93 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	13.396.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	94 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	12.379.000	
	95 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	28.753.000	
	96 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Perkara	27.107.000	
	97 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Perkara	31.606.000	
	98 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Perkara	34.820.000	
	99 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Perkara	28.392.000	
	100 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Perkara	125.418.000	
	101 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Perkara	9.819.000	
	102 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Perkara	11.693.000	
	103 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Perkara	13.032.000	
	104 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Perkara	10.355.000	
	105 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Perkara	51.014.000	
	106 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	17.156.000	
	107 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	15.385.000	
	108 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	18.498.000	
	109 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	16.034.000	
	110 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	57.116.000	
	111 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	15.058.000	
	112 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	18.057.000	
	113 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	20.200.000	
	114 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	15.915.000	
	115 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	80.734.000	
	116 Pendapat dan Saran Hukum (PSH)	1 Perkara	1.812.000	
	117 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 1	1 Perkara	10.290.000	
	118 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 2	1 Perkara	10.999.000	
	119 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 3	1 Perkara	11.818.000	
	120 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 4	1 Perkara	12.182.000	
	121 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 5	1 Perkara	43.411.000	
	Operasi Bidang Pertahanan			
	122 Peserta Operasi Intel Taktis TNI	1 Operasi	14.112.002.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
013.05	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	1 Pembinaan Kemandirian Narapidana	20 Orang	38.300.000	
	2 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	10 Orang	32.990.000	
	3 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis	10 Orang	26.750.000	
	4 Pelatihan Keterampilan Anak	10 Orang	17.300.000	
	5 Pelatihan Kegiatan Pasca-Rehabilitasi	10 Orang	13.900.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Kerja Sama			
	6 Penyusunan Naskah Kerja Sama	1 Kesepakatan	18.892.000	
	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM			
	7 Rekomendasi Pengakuan Kode Etik	1 Rekomendasi Kebijakan	5.880.000	
	8 Penyelesaian Pengaduan	1 Rekomendasi Kebijakan	10.824.000	
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	9 Pendampingan Peradilan Anak	1 Orang	1.750.000	
	10 Pembimbingan dan Pengawasan	1 Orang	1.875.000	
	11 Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan	1 Orang	700.000	
013.06	Direktorat Jenderal Imigrasi			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Operasi Bidang Keamanan			
	1 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi	1 Operasi	96.337.000	
	Operasi Bidang Keamanan			
	2 Operasi Mandiri	1 Operasi	96.337.000	
	3 Operasi Gabungan	1 Operasi	87.108.000	
	4 Penyelidikan Keimigrasian	1 Operasi	109.720.000	
	Operasi Bidang Keamanan			
	5 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi	42.440.000	
	6 Operasi Mandiri di Wilayah	1 Operasi	52.223.000	
	7 Operasi Gabungan di Wilayah	1 Operasi	89.463.000	
	8 Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi	124.871.000	
	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat			
	9 Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut	1 Laporan	18.325.000	
013.10	Badan Pembinaan Hukum Nasional			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan			
	1 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1 Orang/Kasus	8.000.000	
	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat			
	2 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	1 Kegiatan	10.670.000	
013.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Layanan Manajemen SDM Internal			
	1 Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang SIPA Bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	270 Orang	2.962.525.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Layanan Manajemen SDM Internal			
	2 Pendidikan Taruna Tk. I Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1 Orang	30.489.000	
	3 Pendidikan Taruna Tk. II Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1 Orang	27.570.000	
	4 Pendidikan Taruna Tk. III Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1 Orang	27.484.000	
	5 Pendidikan Taruna Tk. IV Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1 Orang	28.285.000	
	6 Masa Basis Calon Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1 Orang	11.486.000	
	7 Pendidikan Taruna Tk. I Politeknik Imigrasi	1 Orang	31.393.000	
	8 Pendidikan Taruna Tk. II Politeknik Imigrasi	1 Orang	28.299.000	
	9 Pendidikan Taruna Tk. III Politeknik Imigrasi	1 Orang	27.648.000	
	10 Pendidikan Taruna Tk. IV Politeknik Imigrasi	1 Orang	29.115.000	
	11 Masa Basis Calon Taruna Politeknik Imigrasi	1 Orang	12.301.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
018.02	Inspektorat Jenderal			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	1 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	51 Laporan	3.567.828.000	
	2 Laporan Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	24 Laporan	1.450.596.000	
	3 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	4 Laporan	155.856.000	
	4 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-KL pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Reviu Laporan Keuangan Kementerian	27 Laporan	938.883.000	
	5 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	50 Laporan	3.572.028.000	
	6 Laporan Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	18 Laporan	1.090.572.000	
	7 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2 Laporan	78.376.000	
	8 Laporan Hasil Reviu laporan Keuangan dan Reviu RKA KL pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	16 Laporan	449.612.000	
	9 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan	51 Laporan	3.567.828.000	
	10 Laporan Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan	24 Laporan	1.450.596.000	
	11 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan	3 Laporan	107.964.000	
	12 Laporan Hasil Reviu laporan Keuangan dan Reviu RKA-KL pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan	24 Laporan	820.038.000	
	13 Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup inspektorat Jenderal, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Badan Karantina Pertanian	51 Laporan	3.548.928.000	
	14 Laporan Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Inspektorat Jenderal, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Badan Karantina Pertanian	24 Laporan	1.440.096.000	
	15 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Inspektorat Jenderal, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Badan Karantina Pertanian	3 Laporan	88.764.000	
	16 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-KL pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Badan Karantina Pertanian	24 Laporan	438.120.000	
	17 Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu	59 Laporan	4.221.000.000	
018.08	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup			
	1 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur	1 Unit	165.000.000	
	2 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Timur	1 Unit	128.000.000	
	3 Irigasi Perpompaan Kecil Wilayah Timur	1 Unit	105.000.000	
	4 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah	1 Unit	140.000.000	
	5 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah	1 Unit	105.000.000	
	6 Irigasi Perpompaan Kecil Wilayah Tengah	1 Unit	85.000.000	
	7 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat	1 Unit	127.000.000	
	8 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat	1 Unit	95.000.000	
	9 Irigasi Perpompaan Kecil Wilayah Barat	1 Unit	76.000.000	
018.09	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			
	1 Rekomendasi Kebijakan Pertanian Mekanisasi	2 Rekomendasi	275.840.000	
	Penelitian dan Pengembangan Produk			
	2 Mikroba Veteriner Terkonservasi dan Terkarakterisasi	100 Jenis	247.049.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
018.12	Badan Karantina Pertanian			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			
	1 Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati (SBK Uji Terap)	1 Uji Terap	181.402.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perhubungan (022) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
022.02	Inspektorat Jenderal			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	1 Laporan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan	1 Dokumen	440.823.000	
	2 Laporan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan BMN	1 Dokumen	291.519.000	
	3 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Dokumen	1.229.340.000	
	4 Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tingkat Eselon I Kementerian Perhubungan	1 Dokumen	372.174.000	
	5 Laporan Survey Kepuasan Pengawasan	1 Dokumen	502.199.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (023) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
023.18	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	1 Anak Usia Sekolah tidak Sekolah Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	1 Orang	4.383.381	
	2 Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	1 Orang	6.257.276	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kesehatan (024)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
024.05	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	1 IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan Insektisida pada Dinding Rumah)	1 Layanan	26.300.000	
	2 IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan Insektisida pada Dinding Rumah) Daerah Sulit Kategori I (Daerah Sulit selain Papua dan Papua Barat)	1 Layanan	36.300.000	
	3 IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan Insektisida pada Dinding Rumah) Daerah Sulit Kategori II (Daerah Papua dan Papua Barat)	1 Layanan	43.000.000	
	4 Survei Darah Massal Malaria (Angka <i>Parasite Rate</i>)	1 Layanan	10.900.000	
	5 Survei Darah Massal Malaria (Angka <i>Parasite Rate</i>) di Daerah Sulit	1 Layanan	19.350.000	
	6 Survei Evaluasi <i>Prevalensi Mikrofilaria</i> Pasca POPM (Pre TAS)	1 Layanan	43.320.000	
	7 Survei Evaluasi <i>Prevalensi Mikrofilaria</i> Pasca POPM (Pre TAS) di Daerah Sulit	1 Layanan	72.630.000	
	8 Penyemprotan Fokus Keong <i>Cshistosomiasis</i>	1 Layanan	30.375.000	
	9 Survei <i>Sentinel</i> malaria <i>Knowledge</i>	1 Layanan	9.100.000	
	Pelayanan Publik Lainnya			
	10 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	1 Layanan	600.000	
	11 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	1 Layanan	600.000	
	12 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di PLBN	1 Layanan	800.000	
	13 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada situasi khusus	1 Layanan	1.455.000	
	14 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional	1 Layanan	2.200.000	
	15 Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan (Kategori I)	1 Layanan	945.000	
	16 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	1 Layanan	1.061.000	
	17 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes	1 Layanan	2.573.000	
	18 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	1 Layanan	433.000	
	19 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Malaria	1 Layanan	1.227.000	
	20 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	1 Layanan	320.000	
	21 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	1 Layanan	1.673.000	
	22 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	1 Layanan	320.000	
	23 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV/AIDS	1 Layanan	3.025.000	
	24 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	1 Layanan	4.555.000	
	25 Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan (Kategori II)	1 Layanan	895.000	
	26 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan	1 Layanan	400.000	
	27 Layanan Penemuan Aktif <i>Surveillans</i> Migrasi Malaria	1 Layanan	870.000	
	28 Layanan Penemuan Aktif <i>Surveillans</i> Migrasi Malaria Kategori 2	1 Layanan	1.920.000	
	Pelayanan Publik Lainnya			
	29 Layanan Kewaspadaan Dini Berbasis Laboratorium	1 Layanan	38.900.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agama (025)				
(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
025.02	Inspektorat Jenderal SBK Indeks Biaya Keluaran Layanan Audit Internal 1 Layanan Audit Internal	1 Dokumen	67.258.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
027.11	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Akreditasi Lembaga			
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi	1 Orang	3.965.620	
	Sertifikasi Profesi dan SDM			
2	Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Yang Mengikuti Proses Sertifikasi	1 Orang	2.129.586	
	Pelatihan Bidang Sosial			
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Padang (210 JP /25 Hari)	1 Orang	17.009.433	
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Padang (120 JP /15 Hari)	1 Orang	11.388.233	
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Padang (100 JP /12 Hari)	1 Orang	10.103.866	
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Padang (80 JP /10 Hari)	1 Orang	9.318.200	
7	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Padang (60 JP /7 Hari)	1 Orang	7.724.066	
8	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Bandung (210 JP /25 Hari)	1 Orang	23.040.500	
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Bandung (120 JP /15 Hari)	1 Orang	14.226.666	
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Bandung (100 JP /12 Hari)	1 Orang	12.911.000	
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Bandung (80 JP /10 Hari)	1 Orang	12.420.333	
12	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Bandung (60 JP /7 Hari)	1 Orang	10.690.166	
13	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Yogyakarta (210 JP /25 Hari)	1 Orang	15.549.866	
14	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Yogyakarta (120 JP /15 Hari)	1 Orang	9.704.733	
15	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Yogyakarta (100 JP /12 Hari)	1 Orang	8.859.400	
16	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Yogyakarta (80 JP /10 Hari)	1 Orang	8.144.066	
17	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Yogyakarta (60 JP /7 Hari)	1 Orang	7.204.400	
18	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Banjarmasin (210 JP/25 Hari)	1 Orang	18.767.300	
19	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Banjarmasin (120 JP/14 Hari)	1 Orang	12.916.366	
20	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Banjarmasin (100 JP/12 Hari)	1 Orang	11.805.533	
21	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Banjarmasin (80 JP/10 Hari)	1 Orang	11.020.533	
22	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Banjarmasin (60 JP/7 Hari)	1 Orang	9.544.266	
23	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Makassar (210 JP /25 Hari)	1 Orang	18.079.666	
24	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Makassar (120 JP /15 Hari)	1 Orang	11.520.866	
25	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Makassar (100 JP /12 Hari)	1 Orang	10.325.533	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	26 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Makassar (80 JP / 10 Hari)	1 Orang	9.484.200	
	27 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Makassar (60 JP / 7 Hari)	1 Orang	7.885.733	
	28 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Jayapura (210 JP/25 Hari)	1 Orang	28.882.866	
	29 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Jayapura (120 JP / 15 Hari)	1 Orang	20.296.866	
	30 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Jayapura (100 JP / 12 Hari)	1 Orang	19.263.533	
	31 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Jayapura (80 JP / 10 Hari)	1 Orang	18.464.200	
	32 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Kesos di BBPPKS Jayapura (60 JP / 7 Hari)	1 Orang	15.553.266	
	Pendidikan Tinggi			
	33 Mahasiswa Prodi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	1 Orang	4.478.314	
	34 Mahasiswa Prodi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	1 Orang	20.651.862	
	35 Mahasiswa Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	1 Orang	22.458.612	
	36 Mahasiswa Prodi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan	1 Orang	29.589.460	

www.jdih.kemenkeu.go.id

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (048) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
048.01	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi			
	SEK Total Biaya Keluaran			
	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan			
	1 Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Tertentu di Wilayah I	28 Lembaga	1 048.526.000	
	2 Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Tertentu di Wilayah II	29 Lembaga	1.089.544.000	
	3 Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Tertentu di Wilayah III	29 Lembaga	1.361.930.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054)				
(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
054.01	Badan Pusat Statistik			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Data dan Informasi Publik			
	1 Publikasi/Laporan Indeks Pembangunan Manusia	1 Publikasi/laporan	902.485.000	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	2 Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah I	38 Layanan	1.325.979.000	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	3 Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II	38 Layanan	1.210.578.000	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	4 Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III	38 Layanan	1.252.486.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Layanan Manajemen SDM Internal			
	5 Diklat Teknis Substansi	1 Layanan	8.416.000	
	6 Diklat Fungsional	1 Layanan	17.635.000	
	7 Standardisasi dan Sertifikasi	1 Layanan	6.992.441	
	Layanan Manajemen SDM Internal			
	8 Program D III	1 Layanan	4.430.968	
	9 Program D IV	1 Layanan	3.819.256	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
056.01	Sekretariat Jenderal			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Prasarana Pengembangan Kawasan			
	1 Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori I	1 Bidang	78.585	
	2 Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori II	1 Bidang	68.467	
	3 Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori III	1 Bidang	59.735	
	4 Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori IV	1 Bidang	50.785	
	5 Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori V	1 Bidang	41.835	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
	6 PBT PTSL ASN Kategori I	1 Bidang	214.600	
	7 PBT PTSL ASN Kategori II	1 Bidang	182.700	
	8 PBT PTSL ASN Kategori III	1 Bidang	151.800	
	9 PBT PTSL ASN Kategori IV	1 Bidang	118.200	
	10 PBT PTSL ASN Kategori V	1 Bidang	88.800	
	11 PBT PTSL ASN Kategori VI	1 Bidang	231.500	
	12 PBT Redistribusi Tanah Kategori 1	1 Bidang	214.600	
	13 PBT Redistribusi Tanah Kategori 2	1 Bidang	182.700	
	14 PBT Redistribusi Tanah Kategori 3	1 Bidang	151.800	
	15 PBT Redistribusi Tanah Kategori 4	1 Bidang	118.200	
	16 PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	1 Bidang	88.800	
	17 PBT Redistribusi Tanah Kategori 6	1 Bidang	231.500	
	18 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1	1 Bidang	473.600	
	19 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2	1 Bidang	402.800	
	20 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	1 Bidang	334.100	
	21 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	1 Bidang	259.400	
	22 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	1 Bidang	195.100	
	23 PBT K4 PTSL ASN Kategori 1	1 Bidang	201.800	
	24 PBT K4 PTSL ASN Kategori 2	1 Bidang	171.100	
	25 PBT K4 PTSL ASN Kategori 3	1 Bidang	141.300	
	26 PBT K4 PTSL ASN Kategori 4	1 Bidang	109.000	
	27 PBT K4 PTSL ASN Kategori 5	1 Bidang	80.900	
	28 PBT Non Sistematis Kategori 1	1 Bidang	422.000	
	29 PBT Non Sistematis Kategori 2	1 Bidang	357.100	
	30 PBT Non Sistematis Kategori 3	1 Bidang	294.200	
	31 PBT Non Sistematis Kategori 4	1 Bidang	225.700	
	32 PBT Non Sistematis Kategori 5	1 Bidang	159.000	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
	33 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1	1 Bidang	1.173.000	
	34 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2	1 Bidang	998.000	
	35 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3	1 Bidang	828.000	
	36 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	1 Bidang	643.000	
	37 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	1 Bidang	463.000	
	38 PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1	1 Bidang	2.273.000	
	39 PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2	1 Bidang	1.923.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (056) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	40 PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3	1 Bidang	1.583.000	
	41 PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 4	1 Bidang	1.213.000	
	42 PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5	1 Bidang	926.000	
	43 PBT BMN Luas Lebih Dari 100.000 M2 Kategori 1	1 Bidang	6.206.000	
	44 PBT BMN Luas Lebih Dari 100.000 M2 Kategori 2	1 Bidang	5.331.000	
	45 PBT BMN Luas Lebih Dari 100.000 M2 Kategori 3	1 Bidang	4.481.000	
	46 PBT BMN Luas Lebih Dari 100.000 M2 Kategori 4	1 Bidang	3.556.000	
	47 PBT BMN Luas Lebih Dari 100.000 M2 Kategori 5	1 Bidang	2.656.000	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
	48 SHAT PTSL ASN Kategori 1	1 Orang	257.000	
	49 SHAT PTSL ASN Kategori 2	1 Orang	234.000	
	50 SHAT PTSL ASN Kategori 3	1 Orang	192.000	
	51 SHAT PTSL ASN Kategori 4	1 Orang	157.000	
	52 SHAT PTSL ASN Kategori 5	1 Orang	124.000	
	53 SHAT PTSL ASN Kategori 6	1 Orang	355.000	
	54 SHAT Non Sistematis Kategori 1	1 Orang	290.000	
	55 SHAT Non Sistematis Kategori 2	1 Orang	251.000	
	56 SHAT Non Sistematis Kategori 3	1 Orang	214.000	
	57 SHAT Non Sistematis Kategori 4	1 Orang	173.000	
	58 SHAT Non Sistematis Kategori 5	1 Orang	140.000	
	59 SHAT Redistribusi Tanah	1 Orang	13.000	
	60 SHAT Konsolidasi Tanah	1 Orang	13.000	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
	61 SHAT BMN (s.d 25.000 M2) Kategori 1	1 Lembaga	874.000	
	62 SHAT BMN (s.d 25.000 M2) Kategori 2	1 Lembaga	734.000	
	63 SHAT BMN (s.d 25.000 M2) Kategori 3	1 Lembaga	598.000	
	64 SHAT BMN (s.d 25.000 M2) Kategori 4	1 Lembaga	450.000	
	65 SHAT BMN (s.d 25.000 M2) Kategori 5	1 Lembaga	306.000	
	66 SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 M2) Kategori 1	1 Lembaga	1.792.000	
	67 SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 M2) Kategori 2	1 Lembaga	1.494.000	
	68 SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 M2) Kategori 3	1 Lembaga	1.205.000	
	69 SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 M2) Kategori 4	1 Lembaga	891.000	
	70 SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 M2) Kategori 5	1 Lembaga	585.000	
	71 SHAT BMN di Atas 100.000 M2 Kategori 1	1 Lembaga	3.730.000	
	72 SHAT BMN di Atas 100.000 M2 Kategori 2	1 Lembaga	3.100.000	
	73 SHAT BMN di Atas 100.000 M2 Kategori 3	1 Lembaga	2.488.000	
	74 SHAT BMN di Atas 100.000 M2 Kategori 4	1 Lembaga	1.822.000	
	75 SHAT BMN di Atas 100.000 M2 Kategori 5	1 Lembaga	1.174.000	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
	76 SK Redistribusi Tanah Kategori I	1 Bidang	314.000	
	77 SK Redistribusi Tanah Kategori II	1 Bidang	277.000	
	78 SK Redistribusi Tanah Kategori III	1 Bidang	246.000	
	79 SK Redistribusi Tanah Kategori IV	1 Bidang	207.000	
	80 SK Redistribusi Tanah Kategori V	1 Bidang	169.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (056) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	81 SK Redistribusi Tanah Kategori VI	1 Bidang	445.000	
	Prasarana Pengembangan Kawasan			
	82 Data dan Informasi P4T Kategori I	1 Bidang	118.000	
	83 Data dan Informasi P4T Kategori II	1 Bidang	106.000	
	84 Data dan Informasi P4T Kategori III	1 Bidang	97.000	
	85 Data dan Informasi P4T Kategori IV	1 Bidang	87.000	
	86 Data dan Informasi P4T Kategori V	1 Bidang	84.000	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
	87 Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I (Bidang)	1 Bidang	529.780	
	88 Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II (Bidang)	1 Bidang	457.480	
	89 Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III (Bidang)	1 Bidang	423.120	
	90 Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV (Bidang)	1 Bidang	380.460	
	91 Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V (Bidang)	1 Bidang	353.500	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
	92 Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I (Materi Teknis)	1 Lembaga	129.551.000	
	93 Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II (Materi Teknis)	1 Lembaga	118.487.000	
	94 Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III (Materi Teknis)	1 Lembaga	115.818.000	
	95 Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV (Materi Teknis)	1 Lembaga	113.893.000	
	96 Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V (Materi Teknis)	1 Lembaga	117.989.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (057)				
(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
057.01	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Sarana Bidang Pendidikan			
	1 Gaban Perpustakaan Yang Dijilid	6.000 Paket	1.288.800.000	
	2 Alih Media Bahan Pustaka dan Naskah Kuno dalam bentuk CD dan File Akses	6.000 Paket	511.540.000	
	3 Restorasi Karya Rckam Koleksi Perpustakaan	6.000 Paket	706.490.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
059.03	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika SBK Indeks Biaya Keluaran Pelayanan Publik Lainnya			
	1. Balmon Kelas I Jakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
	2. Balmon Kelas I Jakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Kepulauan Seribu)	1 Layanan	63.046.000	
	3. Balmon Kelas I Jakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	24.920.000	
	4. Balmon Kelas I Jakarta - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	21.340.000	
	5. Balmon Kelas I Jakarta - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	44.970.000	
	6. Balmon Kelas I Jakarta - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
	7. Balmon Kelas I Jakarta - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	24.920.000	
	8. Balmon Kelas I Jakarta - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
	9. Balmon Kelas I Jakarta - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Koordinasi Hasil Gangguan)	1 Layanan	10.230.000	
	10. Balmon Kelas I Jakarta - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	24.920.000	
	11. Balmon Kelas I Medan - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.876.000	
	12. Balmon Kelas I Medan - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	20.445.000	
	13. Balmon Kelas I Medan - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	9.150.000	
	14. Balmon Kelas I Medan - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	36.335.000	
	15. Balmon Kelas I Medan - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.415.000	
	16. Balmon Kelas I Medan - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Transportasi Udara)	1 Layanan	36.585.000	
	17. Balmon Kelas I Medan - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.914.000	
	18. Balmon Kelas I Medan - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara)	1 Layanan	36.585.000	
	19. Balmon Kelas I Medan - Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Dalam Kota	1 Layanan	4.880.000	
	20. Balmon Kelas I Medan - Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Luar Kota	1 Layanan	23.145.000	
	21. Balmon Kelas I Bandung - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.350.000	
	22. Balmon Kelas I Bandung - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	23.750.000	
	23. Balmon Kelas I Bandung - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	12.300.000	
	24. Balmon Kelas I Bandung - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	45.350.000	
	25. Balmon Kelas I Bandung - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.325.000	
	26. Balmon Kelas I Bandung - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.750.000	
	27. Balmon Kelas I Bandung - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.325.000	
	28. Balmon Kelas I Bandung - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.560.000	
	29. Balmon Kelas I Semarang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
	30. Balmon Kelas I Semarang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	23.050.000	
	31. Balmon Kelas I Semarang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut (Karimunjawa)	1 Layanan	28.100.000	
	32. Balmon Kelas I Semarang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	17.410.000	
	33. Balmon Kelas I Semarang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	49.010.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
34	Balmon Kelas I Semarang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut (Karimunjawa)	1 Layanan	57.710.000	
35	Balmon Kelas I Semarang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
36	Balmon Kelas I Semarang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.050.000	
37	Balmon Kelas I Semarang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut (Karimunjawa)	1 Layanan	28.100.000	
38	Balmon Kelas I Semarang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
39	Balmon Kelas I Semarang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.050.000	
40	Balmon Kelas I Surabaya - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.195.000	
41	Balmon Kelas I Surabaya - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	24.015.000	
42	Balmon Kelas I Surabaya - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	24.810.000	
43	Balmon Kelas I Surabaya - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	87.400.000	
44	Balmon Kelas I Surabaya - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.195.000	
45	Balmon Kelas I Surabaya - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.110.000	
46	Balmon Kelas I Surabaya - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.625.000	
47	Balmon Kelas I Surabaya - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.075.000	
48	Balmon Kelas I Samarinda - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Layanan	5.332.000	
49	Balmon Kelas I Samarinda - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.371.000	
50	Balmon Kelas I Samarinda - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	43.750.000	
51	Balmon Kelas I Samarinda - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.371.000	
52	Balmon Kelas I Samarinda - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.940.000	
53	Balmon Kelas I Samarinda - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	62.592.000	
54	Balmon Kelas I Samarinda - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	67.930.000	
55	Balmon Kelas I Samarinda - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.332.000	
56	Balmon Kelas I Samarinda - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.371.000	
57	Balmon Kelas I Samarinda - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat dan Laut	1 Layanan	25.371.000	
58	Balmon Kelas I Samarinda - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	42.000.000	
59	Balmon Kelas I Samarinda - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.430.000	
60	Balmon Kelas I Samarinda - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Darat	1 Layanan	24.371.000	
61	Balmon Kelas I Samarinda - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	42.000.000	
62	Balmon Kelas I Samarinda - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.371.000	
63	Balmon Kelas I Makassar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.420.000	
64	Balmon Kelas I Makassar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Di Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	27.275.000	
65	Balmon Kelas I Makassar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Di Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	23.575.000	
66	Balmon Kelas I Makassar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	1 Layanan	18.050.000	
67	Balmon Kelas I Makassar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	74.045.000	
68	Balmon Kelas I Makassar - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	25.325.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
69	Balmon Kelas I Makassar - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	23.575.000	
70	Balmon Kelas I Makassar - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.420.000	
71	Balmon Kelas I Makassar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	79.515.000	
72	Blamon Kelas I Makassar - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	23.575.000	
73	Balmon Kelas I Makassar - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	26.575.000	
74	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Layanan	5.290.000	
75	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.925.000	
76	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	22.650.000	
77	Balai Monitor Kelas I Pekanbaru - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	60.325.000	
78	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Transportasi Darat	1 Layanan	21.925.000	
79	Blamon Kelas I Pekanbaru - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	84.325.000	
80	Blamon Kelas I Pekanbaru - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	33.925.000	
81	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pengukuran Frekuensi Dalam Kota	1 Layanan	4.900.000	
82	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika luar kota Transportasi Laut	1 Layanan	33.925.000	
83	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.290.000	
84	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.830.000	
85	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	33.925.000	
86	Balmon Kelas I Palembang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.746.000	
87	Balmon kelas I Palembang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	20.925.000	
88	Balmon Kelas I Palembang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Lewar Sungai/Laut	1 Layanan	21.175.000	
89	Balai Monitor Kelas I Palembang - Penertiban Frekuensi Radio dan Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.340.000	
90	Balai Monitor Kelas I Palembang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	61.980.000	
91	Balai Monitor Kelas I Palembang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.675.000	
92	Balai Monitor Kelas I Palembang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.575.000	
93	Balai Monitor Kelas I Palembang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.675.000	
94	Balai Monitor Kelas I Palembang - Penanganan Gangguan Luar Kota	1 Layanan	20.925.000	
95	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	4.808.000	
96	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	11.361.000	
97	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	18.333.000	
98	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (DIY)	1 Layanan	37.723.000	
99	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Pengukuran Frekuensi Radio (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	13.514.000	
100	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I	1 Layanan	15.100.000	
101	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.825.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	102 Balai Monitor Kelas I Denpasar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.075.000	
	103 Balai Monitor Kelas I Denpasar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.850.000	
	104 Balai Monitor Kelas I Denpasar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	67.468.000	
	105 Balai Monitor Kelas I Denpasar - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.075.000	
	106 Balai Monitor Kelas I Denpasar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	28.950.000	
	107 Balai Monitor Kelas I Denpasar - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.825.000	
	108 Balai Monitor Kelas I Denpasar - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.750.000	
	109 Balai Monitor Kelas I Kupang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Kupang	1 Layanan	7.270.000	
	110 Balai Monitor Kelas I Kupang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	26.950.000	
	111 Balai Monitor Kelas I Kupang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	44.410.000	
	112 Balai Monitor Kelas I Kupang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Kupang	1 Layanan	24.450.000	
	113 Balai Monitor Kelas I Kupang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	36.460.000	
	114 Balai Monitor Kelas I Kupang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	56.770.000	
	115 Balai Monitor Kelas I Kupang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.475.000	
	116 Balai Monitor Kelas I Kupang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.750.000	
	117 Balai Monitor Kelas I Kupang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	44.610.000	
	118 Balai Monitor Kelas I Kupang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.500.000	
	119 Balai Monitor Kelas I Kupang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.750.000	
	120 Balai Monitor Kelas I Kupang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	44.610.000	
	121 Balai Monitor Kelas I Manado - Pemantauan Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Sulu	1 Layanan	5.031.000	
	122 Balai Monitor Kelas I Manado - Pemantauan Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulu Transportasi Darat	1 Layanan	21.906.000	
	123 Balai Monitor Kelas I Manado - Pemantauan Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulu Transportasi Udara Kepulauan	1 Layanan	30.666.000	
	124 Balai Monitor Kelas I Manado - Pemantauan Frekrad dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulu Transportasi Laut Kepulauan	1 Layanan	25.166.000	
	125 Balai Monitor Kelas I Manado - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Sulu	1 Layanan	17.706.000	
	126 Balai Monitor Kelas I Manado - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota Sulu	1 Layanan	67.206.000	
	127 Balai Monitor Kelas I Manado - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Sulu	1 Layanan	5.406.000	
	128 Balai Monitor Kelas I Manado - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Sulu Transportasi Darat	1 Layanan	21.906.000	
	129 Balai Monitor Kelas I Manado - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Sulu	1 Layanan	30.666.000	
	130 Balai Monitor Kelas I Manado - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Sulawesi Utara	1 Layanan	21.937.000	
	131 Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	8.040.000	
	132 Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	33.370.000	
	133 Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua)	1 Layanan	67.306.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
134	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua)	1 Layanan	67.199.000	
135	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	22.520.000	
136	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Papua)	1 Layanan	182.170.000	
137	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	8.040.000	
138	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota (Papua)	1 Layanan	59.306.000	
139	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Dengan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	40.071.000	
140	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.925.000	
141	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	57.732.000	
142	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	4.483.000	
143	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Diluar Kota (Aceh)	1 Layanan	22.335.000	
144	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Di Luar Kota Menggunakan Transportasi	1 Layanan	22.938.000	
145	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	25.625.000	
146	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	55.233.000	
147	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.483.000	
148	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	22.293.000	
149	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh) Dengan Menggunakan Transportasi Laut	1 Layanan	22.725.000	
150	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Didalam Kota	1 Layanan	4.483.000	
151	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	21.953.000	
152	Balai Monitor Kelas II Batam - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.000.000	
153	Balai Monitor Kelas II Batam - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	19.638.000	
154	Balai Monitor Kelas II Batam - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	37.523.000	
155	Balai Monitor Kelas II Batam - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Layanan	28.620.000	
156	Balai Monitor Kelas II Batam - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	66.527.000	
157	Balai Monitor Kelas II Batam - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.450.000	
158	Balai Monitor Kelas II Batam - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	19.948.000	
159	Balai Monitor Kelas II Batam - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	37.873.000	
160	Balai Monitor Kelas II Batam - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.320.000	
161	Balai Monitor Kelas II Batam - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.598.000	
162	Balai Monitor Kelas II Padang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.585.000	
163	Balai Monitor Kelas II Padang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.070.000	
164	Balai Monitor Kelas II Padang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Transportasi Laut	1 Layanan	47.600.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	165 Balai Monitor Kelas II Padang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	12.555.000	
	166 Balai Monitor Kelas II Padang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	41.710.000	
	167 Balai Monitor Kelas II Padang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.975.000	
	168 Balai Monitor Kelas II Padang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.725.000	
	169 Balai Monitor Kelas II Padang - Pengukuran Frekuensi Radio Transportasi Laut	1 Layanan	47.600.000	
	170 Balai Monitor Kelas II Padang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.600.000	
	171 Balai Monitor Kelas II Padang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.725.000	
	172 Balai Monitor Kelas II Jambi - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.650.000	
	173 Balai Monitor Kelas II Jambi - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	21.650.000	
	174 Balai Monitor Kelas II Jambi - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	14.750.000	
	175 Balai Monitor Kelas II Jambi - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar	1 Layanan	43.150.000	
	176 Balai Monitor Kelas II Jambi - Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	21.500.000	
	177 Balai Monitor Kelas II Jambi - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	21.250.000	
	178 Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
	179 Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.475.000	
	180 Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Transportasi Udara) Bengkulu	1 Layanan	24.685.000	
	181 Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	13.690.000	
	182 Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	42.380.000	
	183 Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
	184 Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.825.000	
	185 Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.650.000	
	186 Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.941.000	
	187 Balai Monitor Kelas II Lampung - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.450.000	
	188 Balai Monitor Kelas II Lampung - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
	189 Balai Monitor Kelas II Lampung - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	10.050.000	
	190 Balai Monitor Kelas II Lampung - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	28.226.000	
	191 Balai Monitor Kelas II Lampung - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
	192 Balai Monitor Kelas II Lampung - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
	193 Balai Monitor Kelas II Lampung - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
	194 Balai Monitor Kelas II Lampung - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	17.680.000	
	195 Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000	
	196 Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.660.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
197	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.545.000	
198	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	24.495.000	
199	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	62.265.000	
200	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	54.488.000	
201	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.402.000	
202	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.660.000	
203	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.545.000	
204	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000	
205	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.660.000	
206	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000	
207	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.425.000	
208	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	14.075.000	
209	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	40.870.000	
210	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	22.425.000	
211	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000	
212	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.425.000	
213	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	3.460.000	
214	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	23.000.000	
215	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	10.200.000	
216	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	45.366.000	
217	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.300.000	
218	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.680.000	
219	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.200.000	
220	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.580.000	
221	Balai Monitoring Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.006.000	
222	Balmon Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Darat	1 Layanan	22.947.000	
223	Balmon Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Penyebrangan Air/Laut	1 Layanan	24.338.000	
224	Balmon Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Laut di Gili/Kepulauan	1 Layanan	15.059.000	
225	Balmon Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Udara	1 Layanan	38.060.000	
226	Balmon Kelas II Mataram - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	19.640.000	
227	Balmon Kelas II Mataram - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Darat	1 Layanan	58.762.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
228	Balmon Kelas II Mataram - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	84.982.000	
229	Balmon Kelas II Mataram - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	6.197.000	
230	Balmon Kelas II Mataram - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (NTB) Transportasi Darat	1 Layanan	22.947.000	
231	Balmon Kelas II Mataram - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Penyebrangan Air/Laut	1 Layanan	24.338.000	
232	Balmon Kelas II Mataram - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut di Gili/Kepulauan	1 Layanan	15.059.000	
233	Balmon Kelas II Mataram - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	6.197.000	
234	Balmon Kelas II Mataram - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (NTB)	1 Layanan	24.338.000	
235	Balmon Kelas II Mataram - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (NTB) Transportasi Udara	1 Layanan	38.060.000	
236	Balmon Kelas II Palu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.647.000	
237	Balmon Kelas II Palu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.632.000	
238	Balmon Kelas II Palu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	30.532.000	
239	Balmon Kelas II Palu - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	71.631.000	
240	Balmon Kelas II Palu - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.432.000	
241	Balmon Kelas II Palu - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.632.000	
242	Balmon Kelas II Palu - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	30.532.000	
243	Balmon Kelas II Palu - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.728.000	
244	Balmon Kelas II Palu - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.975.000	
245	Lokmon Kendari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.000.000	
246	Lokmon Kendari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Melalui Transportasi Darat	1 Layanan	22.750.000	
247	Lokmon Kendari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	24.350.000	
248	Lokmon Kendari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	36.330.000	
249	Lokmon Kendari - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	33.050.000	
250	Lokmon Kendari - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	50.630.000	
251	Lokmon Kendari - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.250.000	
252	Lokmon Kendari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	22.750.000	
253	Lokmon Kendari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.000.000	
254	Lokmon Kendari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.330.000	
255	Lokmon Kendari - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.250.000	
256	Lokmon Kendari - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.750.000	
257	Balmon Kelas II Merauke - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.781.000	
258	Balmon Kelas II Merauke - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Yahukimo, Mappi dan Asmat)	1 Layanan	55.161.000	
259	Balmon Kelas II Merauke - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bovenigo, Asiki dan Muting)	1 Layanan	43.161.000	
260	Balmon Kelas II Merauke - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Tanah Miring, Kuring, Jagebol, SeMangga, Nounkejerai, Sota)	1 Layanan	26.855.000	
261	Balmon Kelas II Merauke - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	40.472.000	
262	Balmon Kelas II Merauke - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	123.181.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
263	Balmon Kelas II Merauke - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.010.000	
264	Balmon Kelas II Merauke - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Yahukimo, Mappi dan Asmat)	1 Layanan	53.745.000	
265	Balmon Kelas II Merauke - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Bovendigol, Asiki dan Muting)	1 Layanan	43.145.000	
266	Balmon Kelas II Merauke - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Tanah Miring, Kuring, Jagoboh, SeMangga, Nounkejerai, Sotaj)	1 Layanan	26.839.000	
267	Balmon Kelas II Merauke - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.570.000	
268	Balmon Kelas II Merauke - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	51.901.000	
269	Lokmon Manokwari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.530.000	
270	Lokmon Manokwari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	36.837.000	
271	Lokmon Manokwari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	51.657.000	
272	Lokmon Manokwari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	48.657.000	
273	Lokmon Manokwari - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.390.000	
274	Lokmon Manokwari - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.530.000	
275	Lokmon Manokwari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi laut	1 Layanan	48.657.000	
276	Lokmon Manokwari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	36.837.000	
277	Lokmon Manokwari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	51.657.000	
278	Lokmon Manokwari - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.100.000	
279	Lokmon Manokwari - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	52.120.000	
280	Lokmon Mamuju - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.375.000	
281	Lokmon Mamuju - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Mamuju	1 Layanan	24.150.000	
282	Lokmon Mamuju - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	23.503.000	
283	Lokmon Mamuju - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	63.880.000	
284	Lokmon Mamuju - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.375.000	
285	Lokmon Mamuju - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	24.150.000	
286	Lokmon Mamuju - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.375.000	
287	Lokmon Mamuju - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	24.150.000	
288	Lokmon Ambon - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.595.000	
289	Lokmon Ambon - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi laut	1 Layanan	26.464.000	
290	Lokmon Ambon - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	23.945.000	
291	Lokmon Ambon - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.536.000	
292	Lokmon Ambon - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	28.669.000	
293	Lokmon Ambon - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	40.974.000	
294	Lokmon Ambon - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.517.000	
295	Lokmon Ambon - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	13.320.000	
296	Lokmon Ambon - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	23.670.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
297	Lokmon Ambon - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.400.000	
298	Lokmon Ambon - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	18.594.000	
299	Lokmon Ambon - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	25.796.000	
300	Lokmon Ternate - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.610.000	
301	Lokmon Ternate - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	26.100.000	
302	Lokmon Ternate - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	30.950.000	
303	Lokmon Ternate - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Pulau Terluar	1 Layanan	44.750.000	
304	Lokmon Ternate - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	25.590.000	
305	Lokmon Ternate - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	63.592.000	
306	Lokmon Ternate - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.130.000	
307	Lokmon Ternate - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.800.000	
308	Lokmon Ternate - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	30.950.000	
309	Lokmon Ternate - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.122.000	
310	Lokmon Ternate - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.620.000	
311	Lokmon Pangkal Pinang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.350.000	
312	Lokmon Pangkal Pinang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	18.350.000	
313	Lokmon Pangkal Pinang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	25.790.000	
314	Lokmon Pangkal Pinang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.350.000	
315	Lokmon Pangkal Pinang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	18.350.000	
316	Lokmon Pangkal Pinang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	25.790.000	
317	Lokmon Pangkal Pinang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	8.290.000	
318	Lokmon Pangkal Pinang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	22.308.000	
319	Lokmon Pangkal Pinang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	25.790.000	
320	Lokmon Pangkal Pinang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.290.000	
321	Lokmon Pangkal Pinang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	18.350.000	
322	Lokmon Pangkal Pinang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat/Laut	1 Layanan	25.790.000	
323	Lokmon Gorontalo - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
324	Lokmon Gorontalo - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	18.850.000	
325	Lokmon Gorontalo - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	21.435.000	
326	Lokmon Gorontalo - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	63.885.000	
327	Loka Gorontalo - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
328	Loka Gorontalo - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.850.000	
329	Lokmon Gorontalo - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
330	Lokmon Gorontalo - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.850.000	
331	Blamon Kelas I Tangerang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.750.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	332 Balmon Kelas I Tangerang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	19.600.000	
	333 Balmon Kelas I Tangerang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Kota Tangerang, Tangerang Selatan)	1 Layanan	14.676.000	
	334 Balmon Kelas I Tangerang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	58.878.000	
	335 Balmon Kelas I Tangerang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.300.000	
	336 Balmon Kelas I Tangerang - Pengukuran Frekuensi Dalam Kota (Kota Tangerang, Tangerang Selatan)	1 Layanan	4.950.000	
	337 Balmon Kelas I Tangerang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.950.000	
	338 Balmon Kelas I Tangerang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	19.800.000	
	339 Lokmon Tanjung Selor - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
	340 Lokmon Tanjung Selor - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.350.000	
	341 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	28.900.000	
	342 Lokmon Tanjung Selor - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	23.380.000	
	343 Lokmon Tanjung Selor Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	65.450.000	
	344 Lokmon Tanjung Selor - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
	345 Lokmon Tanjung Selor - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Dengan Transportasi Darat	1 Layanan	24.350.000	
	346 Lokmon Tanjung Selor - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Dengan Transportasi Laut	1 Layanan	28.900.000	
	347 Lokmon Tanjung Selor - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
	348 Lokmon Tanjung Selor - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	30.300.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
063.01	Badan Pengawas Obat dan Makanan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Perkara Hukum Badan Usaha			
	1 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di DKI Jakarta	1 Perkara	79.442.000	
	2 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Bandung	1 Perkara	100.998.000	
	3 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tasikmalaya	1 Perkara	89.186.000	
	4 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Bogor	1 Perkara	89.186.000	
	5 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Semarang	1 Perkara	94.996.000	
	6 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Banyumas	1 Perkara	85.007.000	
	7 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	1 Perkara	85.007.000	
	8 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Yogyakarta	1 Perkara	100.721.000	
	9 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Surabaya	1 Perkara	102.032.000	
	10 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Kediri	1 Perkara	90.913.000	
	11 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Jember	1 Perkara	90.913.000	
	12 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Banda Aceh	1 Perkara	97.576.000	
	13 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Aceh Tengah	1 Perkara	86.958.000	
	14 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Aceh Selatan	1 Perkara	86.958.000	
	15 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Medan	1 Perkara	94.111.000	
	16 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Toba Samosir	1 Perkara	86.223.000	
	17 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungbalai	1 Perkara	82.907.000	
	18 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Padang	1 Perkara	98.887.000	
	19 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Pavakumbuh	1 Perkara	87.139.000	
	20 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Dharmasraya	1 Perkara	87.139.000	
	21 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Pekanbaru	1 Perkara	100.613.000	
	22 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Dumai	1 Perkara	88.429.000	
	23 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Indragiri Hilir	1 Perkara	88.429.000	
	24 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Jambi	1 Perkara	95.006.000	
	25 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Sungai Penuh	1 Perkara	84.367.000	
	26 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Palembang	1 Perkara	95.327.000	
	27 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Lubuklinggau	1 Perkara	84.581.000	
	28 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Bandar Lampung	1 Perkara	90.423.000	
	29 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tulang Bawang	1 Perkara	81.777.000	
	30 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Pontianak	1 Perkara	101.125.000	
	31 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Sanggau	1 Perkara	88.109.000	
	32 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Palangkaraya	1 Perkara	98.399.000	
	33 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kotawaringin Barat	1 Perkara	88.738.000	
	34 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Banjarmasin	1 Perkara	93.131.000	
	35 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara	1 Perkara	82.981.000	
	36 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu	1 Perkara	82.981.000	
	37 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Samarinda	1 Perkara	139.077.000	
	38 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Balikpapan	1 Perkara	116.881.000	
	39 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tarakan	1 Perkara	116.881.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

Kode	Urutan	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	40 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Manado	1 Perkara	95.604.000	
	41 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe	1 Perkara	84.421.000	
	42 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Balai POM Palu	1 Perkara	97.224.000	
	43 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Banggai	1 Perkara	85.636.000	
	44 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Makassar	1 Perkara	99.663.000	
	45 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Palopo	1 Perkara	87.456.000	
	46 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Kendari	1 Perkara	100.848.000	
	47 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Baubau	1 Perkara	88.450.000	
	48 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Ambon	1 Perkara	174.783.000	
	49 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Perkara	133.084.000	
	50 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Denpasar	1 Perkara	107.581.000	
	51 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Buleleng	1 Perkara	94.438.000	
	52 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Mataram	1 Perkara	103.564.000	
	53 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Bima	1 Perkara	91.369.000	
	54 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Kupang	1 Perkara	104.080.000	
	55 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Ende	1 Perkara	89.465.000	
	56 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Manggarai Barat	1 Perkara	89.465.000	
	57 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Jayapura	1 Perkara	191.718.000	
	58 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Merauke	1 Perkara	171.991.000	
	59 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Mimika	1 Perkara	158.884.000	
	60 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Bengkulu	1 Perkara	93.290.000	
	61 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka Rejang Lebong	1 Perkara	82.267.000	
	62 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Solih	1 Perkara	105.613.000	
	63 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupate Pulau Morotai	1 Perkara	91.477.000	
	64 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Serang	1 Perkara	101.424.000	
	65 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Tangerang	1 Perkara	86.031.000	
	66 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Pangkal Pinang	1 Perkara	99.100.000	
	67 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Belitung	1 Perkara	87.384.000	
	68 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Gorontalo	1 Perkara	98.154.000	
	69 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Batam	1 Perkara	123.726.000	
	70 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang	1 Perkara	104.569.000	
	71 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Manokwari	1 Perkara	178.180.000	
	72 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Sorong	1 Perkara	150.441.000	
	73 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Mamuju	1 Perkara	92.885.000	
	Pemantauan Produk			
	74 Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	1 Dokumen	67.960.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
066.01	Badan Narkotika Nasional			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
	1 Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	64.055.500	
	2 Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	23.199.775	
	3 Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	13.286.340	
	4 Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	32.542.000	
	5 Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	17.967.928	
	6 Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	12.462.200	
	7 Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	1 Orang	37.580.600	
	8 Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	1 Orang	22.011.300	
	9 Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	1 Orang	11.430.114	
	10 Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	28.462.714	
	11 Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	14.758.875	
	12 Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	7.961.230	
	13 Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	1 Orang	22.409.000	
	14 Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	1 Orang	13.197.393	
	15 Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	1 Orang	6.696.590	
	16 Program Rehabilitasi 12 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	1 Orang	27.757.000	
	17 Program Rehabilitasi 6 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	1 Orang	15.599.625	
	18 Program Rehabilitasi 3 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	1 Orang	7.951.625	
	Penyidikan dan Pengujian Produk			
	19 Layanan Pemeriksaan Uji Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya	1 Orang	254.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (067)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Pelatihan Bidang Sosial			
	1 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.032.000	
	2 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.557.766	
	3 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	4.766.400	
	4 Pengelola BumDesa yang Dilatih di UPT Balai Besar Yogyakarta	1 Orang	4.201.333	
	5 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.195.933	
	6 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.493.000	
	7 Pengelola BumDesa yang Dilatih di UPT Balai Makassar	1 Orang	3.878.333	
	8 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.806.333	
	9 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	6.570.566	
	10 Pengelola BumDesa yang Dilatih di UPT Balai Banjarmasin	1 Orang	4.238.400	
	11 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	6.801.133	
	12 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	7.197.933	
	13 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.542.500	
	14 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	6.029.833	
	15 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	6.371.500	
	16 Pengelola BumDesa yang Dilatih di UPT Balai Ambon	1 Orang	4.469.866	
	17 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.614.966	
	18 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	6.973.933	
	19 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Laut	1 Orang	6.445.600	
	20 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	7.618.500	
	21 Pengelola BumDes yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	9.089.300	
	22 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	8.135.333	
	23 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	8.854.266	
	24 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.682.000	
	25 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	6.436.666	
	26 Pengelola BumDesa yang Dilatih di UPT Balai Bengkulu	1 Orang	5.083.733	
	27 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	6.180.666	
	28 Pengelola BumDesa yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	6.929.866	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (075) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
075.01	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Sosialisasi dan Diseminasi			
	1 Layanan Informasi Gempabumi dan Tsunami Melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Barat	1600 orang	1.440.000.000	
	2 Layanan Informasi Gempabumi dan Tsunami Melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Tengah	1200 Orang	1.170.000.000	
	3 Layanan Informasi Gempabumi dan Tsunami Melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Timur	800 Orang	890.000.000	
	Sosialisasi dan Diseminasi			
	4 Layanan Informasi Posisi Bulan dan Matahari	1 Layanan	358.254.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	1 Layanan Informasi Meteorologi Maritim Melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Wilayah Barat	1 orang	1.150.000	
	2 Layanan Informasi Meteorologi Maritim Melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Wilayah Tengah	1 orang	1.350.000	
	3 Layanan Informasi Meteorologi Maritim Melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Wilayah Timur	1 orang	1.531.250	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) (080) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
080.01	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Penelitian dan Pengembangan Produk			
	1 Paket Limbah Radioaktif Semi Cair/Resin Olahan Dalam Shell Beton	4 Produk	187.600.000	
	2 Paket Limbah Radioaktif Padat Olahan Dalam Drum	100 Produk	260.620.000	
	3 Paket Limbah Radioaktif Cair Olahan Dalam Drum Shell Beton	2 Produk	389.741.000	
	Kebijakan Bidang Tenaga Nuklir			
	4 Data Dosis Radiasi Eksternal dan Internal Pekerja Radiasi di Kawasan Nuklir Serpong	1 Rekomendasi	97.635.000	
	5 Data Radioaktivitas Lingkungan Kawasan Nuklir Serpong	1 Rekomendasi	276.771.000	
	6 Rekomendasi Hasil Uji Profisiensi Laboratorium di BATAN untuk Pengukuran Radiasi Gamma	1 Rekomendasi	186.830.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (081) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
081.01	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	1 Jasa Pelatihan Teknologi Polimer (PNBP)	1 Layanan	240.464.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (082) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
082.01	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Data dan Informasi Publik			
	1 Data Penginderaan Jauh Terproduksi Hasil Akuisisi (Rendah, Menengah,Tinggi)	1 Layanan	251.726.000	
	2 Data Penginderaan Jauh Terproduksi Hasil Akuisisi (Sangat Tinggi)	1 Layanan	188.824.000	
	3 Data Penginderaan Jauh Terproduksi Hasil Akuisisi (SAR)	1 Layanan	32.574.000	
	Data dan Informasi Publik			
	4 Data Antariksa dan Atmosfer (BPAA Sumedang)	1 Layanan	93.564.000	
	5 Data Antariksa dan Atmosfer (BPAA Pasuruan)	1 Layanan	104.432.000	
	6 Data Antariksa dan Atmosfer (BPAA Pontianak)	1 Layanan	109.710.000	
	7 Data Antariksa dan Atmosfer (BPAA Agam)	1 Layanan	195.054.000	
	Data dan Informasi Publik			
	8 Data Telemetri Satelit LAPAN	1 Layanan	74.563.000	
	9 Data Misi Satelit	1 Layanan	49.109.000	
	10 Data Antariksa dan Atmosfer	1 Layanan	22.540.000	
	11 Data Antariksa dan Atmosfer (BUTPAA Garut)	1 Layanan	31.000.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
089.01	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Pengawasan Pembangunan			
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	250.441.000	
2	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	1 Laporan	250.441.000	
3	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Badan Usaha	1 Laporan	250.441.000	
4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	1 Laporan	332.709.000	
	Pengawasan Pembangunan			
5	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	250.441.000	
6	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	251.916.000	
7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	153.598.000	
8	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	153.598.000	
	Pengawasan Pembangunan			
9	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
10	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
12	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
13	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
14	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
15	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
16	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
17	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
18	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
19	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
20	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
22	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
24	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
25	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
26	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
27	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
28	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
29	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pengawasan Pembangunan			
30	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
31	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
32	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
33	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
34	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
35	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
36	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
37	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
38	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
39	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
40	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
41	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
42	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
43	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
44	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
45	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
46	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
47	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Badan Usaha Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
48	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
49	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
50	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Badan Usaha Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
51	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.923.369.000	
53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
54	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Badan Usaha	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
55	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
56	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.923.369.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pengawasan Pembangunan			
57	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
58	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Badan Usaha Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
59	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
60	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
61	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Badan Usaha Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.020.212.000	
	Pengawasan Pembangunan			
62	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Program Prioritas Nasional Yang Ditargetkan	1 Laporan	2.020.212.000	
63	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.923.369.000	
	Pengawasan Pembangunan			
64	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
65	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	1 Laporan	589.167.000	
	Pengawasan Pembangunan			
66	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	508.374.000	
	Pengawasan Pembangunan			
67	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
68	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	1 Laporan	589.167.000	
	Pengawasan Pembangunan			
69	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	508.374.000	
	Pengawasan Pembangunan			
70	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara	1 Laporan	2.020.212.000	
71	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	1 Laporan	589.167.000	
	Pengawasan Pembangunan			
72	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan Atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	508.374.000	
	Pengawasan Pembangunan			
73	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	1 Laporan	589.167.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perdagangan (090) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
090.09	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Sertifikasi Profesi dan SDM			
	1 Sertifikasi Person	1 Orang	677.000	
	2 Sertifikasi Bimbingan Teknis	1 Orang	3.272.000	
	Sertifikasi Produk			
	3 Sertifikasi Produk Tipe 5 Dalam Negeri	1 Produk	10.191.000	
	4 Sertifikasi Produk Tipe 5 Luar Negeri	1 Produk	20.799.000	
	5 Sertifikasi Produk Tipe 1 Dalam Negeri	1 Produk	1.760.000	
	6 Sertifikasi Produk Tipe 1 Luar Negeri	1 Produk	3.808.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pemberantasan Korupsi (093) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
093.01	Komisi Pemberantasan Korupsi			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Sertifikasi Profesi dan SDM			
	1 Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Antikorupsi	1 Orang	1.438.200	

Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial RI (100) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
100.01	Komisi Yudisial RI			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat			
	1 Laporan Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	22 Laporan	1.710.400.000	
	2 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Hasil Rekam Jejak Hakim dan CHA	48 Hakim	2.894.739.000	
	3 Investigasi Pendalaman Kasus	2 Hakim	328.708.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			
	4 Usulan Rekomendasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik	1 Rekomendasi	327.800.000	
	Standarisasi Profesi dan SDM			
	5 Standarisasi Calon Hakim Agung/Ad Hoc di MA	48 Hakim	3.159.974.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) (107) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
107.01	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat			
	1 Siaga SAR Khusus Lebaran Kantor SAR	1 Laporan	143.667.000	
	2 Siaga SAR Khusus Lebaran Pos SAR	1 Laporan	72.760.000	
	3 Siaga SAR Khusus Lebaran Unit Siaga SAR	1 Laporan	42.190.000	
	4 Siaga SAR Khusus Nataru Kantor SAR	1 Laporan	48.327.000	
	5 Siaga SAR Khusus Nataru Pos SAR	1 Laporan	24.645.000	
	6 Siaga SAR Khusus Nataru Unit Siaga SAR	1 Laporan	13.560.000	
	SEK Indeks Biaya Keluaran			
	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana			
	7 Peringkatan dan Pengembangan Kompetensi Petugas SAR	1 Orang	4.120.000	
	8 Pemeliharaan Kompetensi Petugas SAR	1 Orang	5.528.000	
	9 Diklat Dasar SAR	1 Orang	41.600.000	
	10 Diklat Perencanaan Operasi SAR	1 Orang	16.340.000	
	11 Diklat SAR di Air	1 Orang	16.370.000	
	12 Diklat SAR di Bangunan Runtuh	1 Orang	17.000.000	
	13 Diklat Teknis Komunikasi SAR	1 Orang	12.900.000	
	14 Diklat <i>Medical First Responder</i>	1 Orang	15.000.000	
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	15 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Air (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.575.000	
	16 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.575.000	
	17 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.575.000	
	18 Pelatihan Teknis Potensi SAR <i>Medical First Responder</i> (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.575.000	
	Koordinasi			
	19 Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh	1 Kegiatan	100.002.000	
	20 Latihan SAR Beregu di Ketinggian	1 Kegiatan	28.510.000	
	21 Latihan SAR Beregu di Gunung dan Hutan	1 Kegiatan	37.878.000	
	22 Latihan SAR Beregu di Air	1 Kegiatan	33.650.000	
	23 Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh	1 Kegiatan	107.944.000	
	24 Latihan SAR Satuan di Ketinggian	1 Kegiatan	40.522.000	
	25 Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan	1 Kegiatan	50.778.000	
	26 Latihan SAR Satuan di Air	1 Kegiatan	46.247.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia (116) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
116.01	Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Komunikasi Publik			
	1 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Layanan	3.863.000	
	2 Program Buletin Berita	1 Layanan	860.000	
	3 Program <i>Feature</i>	1 Layanan	731.000	
	4 Program Siaran Langsung Reportase	1 Layanan	1.835.000	
	5 Program Produksi Komentar	1 Layanan	495.000	
	6 Program Produksi Kaleidoskop	1 Layanan	1.607.000	
	7 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Layanan	361.000	
	8 Program Siaran Wawancara	1 Layanan	567.000	
	Komunikasi Publik			
	9 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Layanan	1.218.000	
	10 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Layanan	4.948.000	
	11 Program Produksi SPOT	1 Layanan	195.000	
	12 Program Produksi Buletin Berita	1 Layanan	877.000	
	13 Program Siaran Produksi <i>Feature</i>	1 Layanan	672.000	
	14 Program Produksi Laporan Mendalam	1 Layanan	1.000.000	
	15 Program Siaran Langsung Reportase	1 Layanan	1.910.000	
	16 Program Produksi Majalah Udara	1 Layanan	936.000	
	17 Program Siaran Kuis	1 Layanan	408.000	
	18 Program Produksi Sandiwara Radio	1 Layanan	1.829.000	
	19 Program Siaran Pengelaran	1 Layanan	14.592.000	
	20 Program Produksi Komentar	1 Layanan	460.000	
	21 Program Produksi Dokumenter	1 Layanan	1.452.000	
	22 Program Produksi Kaleidoskop	1 Layanan	1.550.000	
	23 Program Siaran Obrolan	1 Layanan	469.000	
	24 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Layanan	332.000	
	25 Program Produksi <i>Report On The Spot (ROS)</i>	1 Layanan	82.000	
	26 Program Siaran Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i>	1 Layanan	3.020.000	
	27 Program Siaran Wawancara	1 Layanan	587.000	
	Komunikasi Publik			
	28 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Layanan	4.661.000	
	29 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Layanan	6.207.000	
	30 Program Produksi SPOT	1 Layanan	514.000	
	31 Produksi <i>Buletin</i> Berita	1 Layanan	876.000	
	32 Produksi <i>Feature</i>	1 Layanan	671.000	
	33 Produksi Laporan Mendalam	1 Layanan	987.000	
	34 Program Siaran Langsung Reportase	1 Layanan	1.909.000	
	35 Produksi Majalah Udara	1 Layanan	937.000	
	36 Siaran Kuis	1 Layanan	408.000	
	37 Program Produksi Komentar	1 Layanan	939.000	
	38 Produksi Dokumenter	1 Layanan	1.451.000	
	39 Produksi Kaleidoskop	1 Layanan	1.495.000	
	40 Siaran Obrolan	1 Layanan	469.000	
	41 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Layanan	335.000	
	42 Produksi <i>Report On The Spot (ROS)</i>	1 Layanan	81.000	
	43 Program Siaran Wawancara	1 Layanan	589.000	
	44 Siaran Adlibs	1 Layanan	148.000	
	45 Siaran Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i>	1 Layanan	5.065.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Keamanan Laut (119) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
119.01	Badan Keamanan Laut			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	Operasi Bidang Keamanan			
	1 Operasi Udara Maritim	1 Operasi	5.762.552.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (123)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
123.01	Sekretariat Jenderal SBK Indeks Biaya Keluaran Pelayanan Publik Kepada Masyarakat 1 Layanan Penerimaan dan Penclaaahan Permohonan	1 Orang	34.885.000	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213-199703 1 001